

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN PTPN VII
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

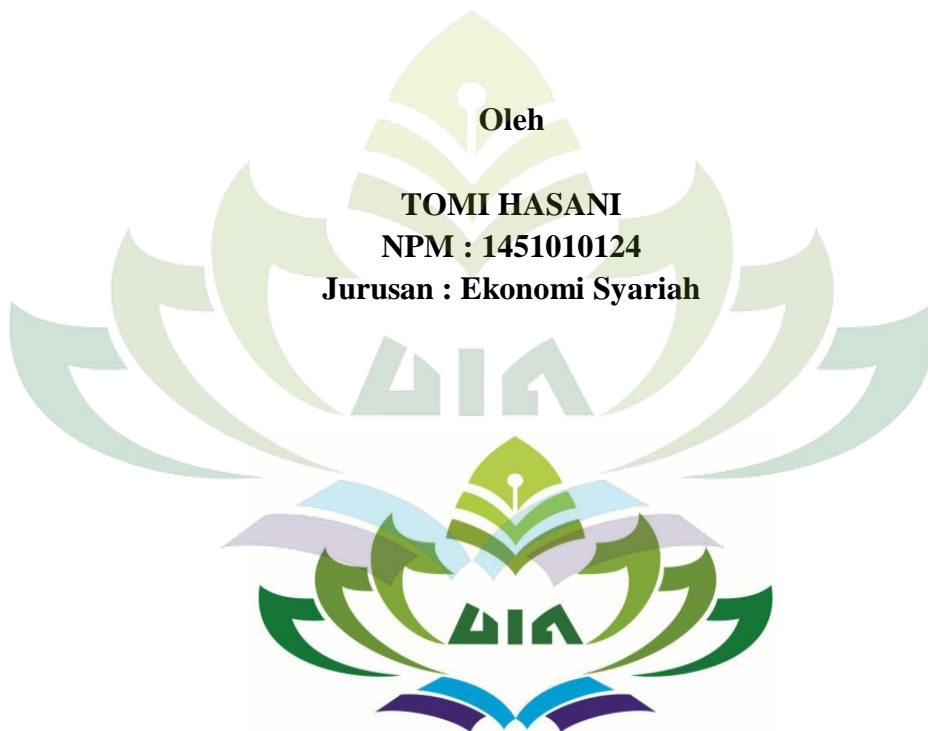
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ekonomi Syariah**

Oleh

TOMI HASANI

NPM : 1451010124

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN PTPN VII
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ekonomi Syariah**

Oleh

TOMI HASANI

NPM : 1451010124

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Hanif, SE, MM

Pembimbing II : Suhendar, M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain untuk dapat saling melengkapi satu sama lain. Dalam upaya meningkatkan kepedulian kesejahteraan hidup individu maupun masyarakat yang diidentifikasi dengan tingkat ekonomi dan pendapatan, maka perlu ada kepedulian dari berbagai pihak. Pelaksanaan program kemitraan PTPN VII UKK Way Berulu, Program Kemitraan yang terdapat dalam PTPN VII UKK Way Berulu yang bergerak di perkebunan industri karet, perkebunan serta agrobisnis. Namun dibalik suksesnya sebuah industri perkebunan karet yang sukses terdapat timbal balik antara perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program kemitraan PTPN VII dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat? bagaimana peran pelaksanaan program kemitraan PTPN VII dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat? Dan Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program kemitraan PTPN VII Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pelaksanaan Program Kemitraan PTPN VII dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap peran Pelaksanaan Program Kemitraan PTPN VII Dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di desa kebagusan, Tataan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis field research (penelitian lapangan). Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan karyawan PTPN VII UKK Way Berulu.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kemitraan PTPN VII dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di desa Kebagusan, Tataan, Adalah berupa PKBL program kemitraan dan program peminjaman dana. Peran pelaksanaan program kemitraan PTPN VII dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di desa Kebagusan, Tataan. Adalah sebagai wadah aspirasi atau musyawarah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dengan mengadakan pemberdayaan ekonomi. Kemudian pandangan ekonomi Islam terhadap peran pelaksanaan program kemitraan PTPN VII Yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kegiatan positif dan tidak melanggar ketentuan dari Allah SWT baik peran pelaksanaan program kemitraan yang sudah dibuat maupun proses pelaksanaannya terhadap masyarakat. Pelaksanaan program kemitraan yang dilakukan Oleh PTPN VII dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (individu) dan mencapai falah di dunia dan falah di akhirat.

Kata kunci: pelaksanaan program, PTPN VII, pendapatan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan PTPN VII
Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat
Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di PTPN VII
UKK Way Berulu, Desa Kebagusan Kecamatan Gedong
Tataan, Kabupaten Pesawaran)"**

**Nama : Tomi Hasani
NPM : 1451010124
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I


Hanif SE., MM

NIP. 19740823200031001

Pembimbing II



Suhendar, S.E M.S.Ak., Akt

NIP. 198510302019031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Madnasir, S.E., M.Si

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan PTPN VII Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)” disusun oleh Tomi Hasani, NPM. 1451010124 telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, pada hari/tanggal : kamis, 29 Agustus 2019

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Ahmad Isaeni, M.A

Sekretaris : M. Fikri Nugraha kholid, M.Pd

Penguji I : Madnasir, S.E.M.Si

Penguji II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt

DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP.198008012003121001

MOTTO

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”(Q.S Al-Baqarah ayat 177).¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 Surat Al-Baqarah ayat 177, Hlm. 27

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati tak henti-hentinya saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya sehingga saya bias menyelesaikan karya tulis ini. Sebagai tanda bukti dan cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, bapakku Abdullah Hasan dan Ibunda tercinta Semi, yang tak henti selalu memanjatkan do'a untuk saya, berjuang untuk keberhasilanku memberi cinta dan kasih sayang serta mendidikku sehingga tahu artinya hidup dan bagaimana harus bersikap, sampai menghantarkanku meraih gelar Sarjana.
2. Kepada kakak saya Meika Rani dan adikku tersayang Novriansyah yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada saya selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini, juga jadilah jadi dirimu sendiri meskipun banyak tantangan yang dihadapi jangan pernah terbawa arus pergaulan dan jadilah kebanggaan keluarga khususnya kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah dalam mendidik hingga membesarkan hingga saat ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tomi Hasani lahir di Sidodadi, pada tanggal 06 Oktober 1995. penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah kasih dari pasangan Bapak Abdullah Hasan dan Ibu Semi. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis yaitu pendidikan sekolah dasar di SDN 02 Gunung Raya Kabupaten Lampung Tengah, diselesaikan pada tahun 2007. menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 03 Padang Ratu, diselesaikan pada tahun 2011. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Padang Ratu dan diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Demikianlah riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek pendidikan.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2019

Tomi Hasani
1451010124

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan PTPN VII Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi di PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program sarjana satu (S1) Jurusan ekonomi syariah Fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sebesar-besarnya, secara rinci ungkapkan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Ruslan Abdur Ghofur S.Ag., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

3. Madnasir SE, M.S,i S.Ag., selaku Ketua Jurusan ekonomi syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak hanif, SE, MM selaku dosen pembimbing I dan Suhendar M.S. Ak selaku dosen pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, motivasi, dukungan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada saya.
6. Para Pegawai Perpustakaan baik Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung maupun Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan skripsi saya.
7. Kepada Bapak Ir. Sugeng Budi Prasongko, MM selaku kepala unit UKK Way Berulu yang telah bersedia saya wawancarai dan seluruh masyarakat didesa kebagusan yang telah membantu saya dalam mengumpulkan Data Penelitian ini.
8. Selvi Ulvina S.Sos yang telah banyak membantu selama ini, menemani dalam suka dan duka, selalu memberi dukungan, dan sudah mendo'akan saya hingga bisa menyelesaikan studi ini.
9. Sahabat-sahabatku indah feria, alvin muqsit, hadi nurhidayat, sanopa hendar riyanto, intan suri mahardika, agus mulato, arif nurhidayat, eka budianta, muhammad aji ridwan mas, dian kurniawan, yang telah

memberikan motivasi, selalu mensupport, selalu memberikan semangat dan selalu mendo'a kan saya selama ini.

10. Untuk teman-teman seperjuanganku ekonomi syariah angkatan 2014 terimakasih telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan memberikan sebuah kenangan indah yang takkan pernah terlupakan.

11. Para informan yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kerja samanya.

12. Almamater Tercinta kampus Hijau UIN Raden Intan Lampung .

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah kata-kata yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk karuniannya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya diiringi dengan usaha dan Do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT jerih payah dan amal bapak ibu dosen dan teman-teman sekalian semoga mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2019

Penyusun

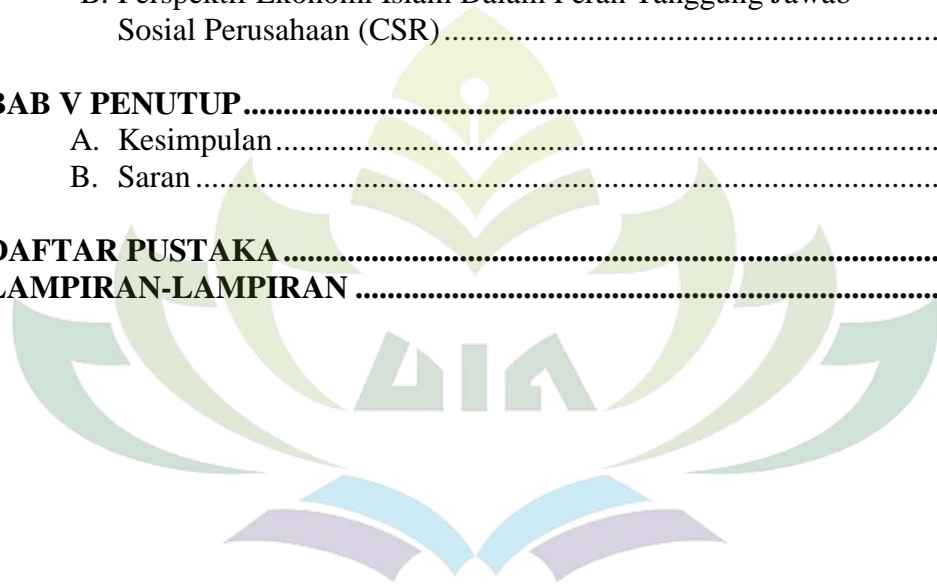
Tomi Hasani

1451010124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
1. Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
2. Kemitraan.....	27
B. Tanggung Jawab Sosial CSR Dalam Perspektif Ekonomi Islam	34
C. Sejarah CSR.....	38
D. Jenis-Jenis <i>Corporate Social Responsibility</i>	40
E. Indikator CSR	43
F. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	46
G. Konsep Pendapatan Masyarakat	48
H. Etika Dalam Persepektif Islam	52
I. Prinsip Dasar Etika Islam Dan Prakteknya Dalam Bisnis	54
J. Konsep Pendapatan Masyarakat.....	58
BAB III LAPORAN PENELITIAN	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian PTPN VII UKKWay Berulu ..	66
1. Sejarah Berdirinya PTPN VII UKK Way Berulu	66
2. Visi Dan Misi PTPN VII UKK Way Berulu	67
3. Pelaksanaan CSR PTPN VII UKK Way Berulu.....	74
4. Peran Utama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	75
5. Gambaran Desa Kebagusan	79

6. Struktur Pemerintahan Desa Kebagusan Tataan.....	82
B. Deskripsi Masyarakat Berkaitan Dengan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PTPN VII UKKWay Berulu Desa Kebagusan Gedong Tataan.....	84
C. Kondisi Kesejahteraan Dan Pendapatan Masyarakat Desa Kebagusan Way Berulu Sebelum Dan Sesudah Adanya Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PTPN VII UKK Way Berulu.....	88
BAB IV ANALISI DATA	97
A. Analisis Pelaksanaan Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PTPN VII UKKWay Berulu Melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan.....	97
B. Perspektif Ekonomi Islam Dalam Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).....	102
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi PTPN VII UKK Way Berulu
- Gambar 2 Struktur Organisasi Desa Kebagusan, Tataan, Pesawaran



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klarifikasi Responden Berdasarkan Usia
Tabel 2	Klarifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 3	Klarifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4	Klarifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan
Tabel 6	Distribusi Tanggapan Responden Terhadap CSR
Tabel 7	Pendapatn Rata-Rata Penduduk
Tabel 8	Pendapatan Rata-Rata Penduduk
Tabel 9	Pola Konsumsi Responden
Tabel 11	Prasarana Pendidikan Masyarakat
Tabel 12	Tingkat Kesehatan Masyarakat
Tabel 13	Tingkat Perumahan Masyarakat

BAB I PENDAHULUAN

A. 'Penegasan Judul

Dalam Penegasan judul ini penulis akan membahas kata-kata yang dianggap memang penting untuk dibahas, agar bahasan ini dapat terarah, untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan. Adapun judul skripsi ini adalah “ **Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan PTPN VII dalam meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat di tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**”.

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya).¹ penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan sebagai proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
2. **Dampak** adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lain. Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dampak ataupun pengaruh yang ditimbulkan oleh Program Kemitraan (Variabel X) terhadap Pendapatan Ekonomi (Variabel Y) pada PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.²

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2005), h.29.

² Sugiono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 7.

3. **Program Kemitraan** adalah program untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri sasaran utama dari program ini adalah para UMKM yang dapat dikatakan dalam status non – Bankable atau belum mendapatkan akses pinjaman modal dari bank. Namun keistimewaan program kemitraan dibandingkan bank adalah pinjaman yang diberikan suatu entitas PKBL kepada mitra binaannya hanya dikenakan bunga 6% flat per tahun dan diberikan pembinaan secara gratis baik berupa peningkatan kapasitas dalam bentuk keikutsertaan pameran skala nasional atau penyelenggara bazar.
4. **Kegiatan Perusahaan** dalam perspektif islam bukan hanya suatu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah saja, tetapi harus bertanggung jawab kepada sebagai pihak yang berkepentingan dalam usaha dan lingkungan alam sekitar sekelilingnya. Adanya bentuk *Corporate Social Responsibility* yang sesuai dengan kaidah-kaidah islam merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji demi kemaslahatan bersama
5. **Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *Falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunah.³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian dengan tujuan untuk membahas lebih dalam mengenai Dampak dari program kemitraan yang ditetapkan Pemerintah pada PTPN VII Nusantara Terhadap pendapatan Ekonomi

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.19.

masyarakat Desa Kebagusan Gedong Tataan, dengan mengambil studi kasus pada PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

B. Alasan Memilih judul

Ada beberapa alasan penulis yang menjadi dasar bagi penulis memilih judul “**Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan PTPN VII Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam** (PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).

1. Alasan Objektif

- a. Program kemitraan dilakukan untuk menjamin tidak terjadinya monopoli oleh perusahaan PTPN VII tertentu dan juga mengatur keberlangsungan usaha. Program kemitraan tidak saja memanage agar tidak terjadinya monopoli antara perusahaan dan daerah yang di jadikan pusat pendirian perusahaan itu berdiri,penetapan program ini dibagi menjadi Program Kemitraan (PK) dengan Usaha Kecil untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar menjadi tangguh dan mandiri dengan prinsip logika ekonomi, sedangkan Program Bina Lingkungan (PBL) dilakukan melalui hubungan kerja sama kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN tersebut.
- b. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri sasaran utama dari program ini

adalah para UMKM yang dapat dikatakan dalam status non – Bankable atau belum mendapatkan akses pinjaman modal dari bank. Namun keistimewaan program kemitraan dibandingkan bank adalah pinjaman yang diberikan suatu entitas PKBL kepada mitra binaannya hanya dikenakan bunga 6% flat per tahun dan diberikan pembinaan secara gratis baik berupa peningkatan kapasitas dalam bentuk keikutsertaan pameran skala nasional atau penyelenggara bazar.

2. Alasan Subjektif

- a. Peneliti melakukan penelitian ini karena banyak referensi mendukung dari skripsi yang akan diteliti sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi yang akan diteliti sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya.
- b. Banyak referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Menurut harahap“ Filosofi Bisnis yang dimiliki sejak awal seharusnya adalah pihak korporasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitar. Begitu juga sebaliknya, masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pihak korporasi. Untuk itu, perlu keharmonisan dan keselarasan antara pihak korporasi dan masyarakat sekitar, agar saling menguntungkan.”

Manusia adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain untuk dapat saling melengkapi satu sama lain. Dari sinilah dapat dilihat bahwa kebutuhan manusia itu sendiri dapat berbeda antara individu yang satu dengan lainnya. Dalam upaya meningkatkan kepedulian kesejahteraan hidup individu maupun masyarakat yang diidentifikasi dengan tingkat ekonomi dan pendapatan, maka perlu ada kepedulian dari berbagai pihak. Karena masalah tersebut bukan hanya tugas dari pemerintah, yang merupakan sebuah lembaga yang memang mempunyai tanggung jawab besar meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga merupakan tugas semua komponen bangsa, termasuk didalamnya perusahaan.

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa eksistensi suatu perusahaan tidak dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Dua aspek penting harus adalah, dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan (*Profit*) dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat sekitar menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi dan perannya secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan, maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi

masyarakat atau gejolak sosial. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep CSR perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab dalam berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam komunitasnya maupun masyarakat luas. Karena dalam hal ini, perusahaan merupakan organisasi yang mengadakan transaksi atau tata usaha dalam suatu wilayah tertentu. Semua perusahaan harus bersikap proaktif berkaitan dengan persoalan tanggung jawab sosial yang mencerminkan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan komunitas luas.

Salah satu bentuk nyata hubungan antara suatu perusahaan dengan lingkungan komunitasnya, yaitu adanya tanggung jawab sosial perusahaan *atau* disebut *Corporate Social Responsibility*, merupakan suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam aspek operasional.⁴

Pada pratiknya, terkadang konsep CSR tereduksi, menjadi sebatas kegiatan yang sifat ritual kegiatan amal, terlepas dari aspek keseluruhan kegiatan perusahaan. Misalkan saja seperti perusahaan harinya membuang limbah beracun mencemari sungai sekitar, mengeksploitasi lahan, pohon dan hewan sekitar perusahaan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam maupun bencana sosial. Melakukan kegiatan amal dalam bentuk materi bantuan kepada masyarakat, namun kegiatan

⁴http://id.m.wikipedia.org/wiki/tanggungjawab_sosial_perusahaan.di akses pada tanggal

itu hanya untuk menarik simpati masyarakat dan menutupi akibat buruk dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. CSR jauh lebih luas dari sekedar untuk menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan, untuk sebatas kegiatan amal yang sifatnya *Temporer* dan *Incidental* tersebut. CSR merupakan bagian upaya pembangunan berkelanjutan, yakni sebuah perusahaan dalam membuat setiap keputusannya mulai dari visi, misi, tujuan, strategi, dan setiap kegiatannya, harus memperhatikan dampak keseluruhan aspek. Selain itu juga harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan sekelilingnya yang bersifat jangka panjang. Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana tercantum dalam pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Salah satu bentuk perseroan yaitu PTPN VII UKK Way Berulu, Desa kebagusan yang menjadi obyek penelitian merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain melekat tujuan perusahaan untuk memperoleh optimalisasi laba, perusahaan juga diuntut untuk memberikan layanan kepada publik. Tujuan dari program-program CSR itu sendiri berkaitan dengan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Dapat juga dikatakan bahwa perusahaan mempertahankan eksistensinya dengan melakukan program-program CSR. Eksistensi perusahaan erat hubungannya dengan *Stakeholders* perusahaan. Dengan demikian CSR,

adalah salah satu bentuk peran tanggung jawab perusahaan untuk investasi masa depan. Karena melalui adanya peran tanggung jawab yang dilakukan perusahaan dapat menciptakan kesejahteraan bersama. Masyarakat juga ikut menjaga eksistensi perusahaan terkait dengan konteks perusahaan, peran diartikan suatu tindakan yang dilakukan, mengenai berbagai kebijakan, personil, produk atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusahaan.

Aspek CSR ini memiliki tempat dalam Islam juga. Seperti yang diatas, menegakkan keadilan sosial dan melayani kepentingan publik sarana penting pencapaian maqasid syari'ah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".(QS;Al-Baqarah:177).⁵

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010
Surat Al-Baqarah ayat 177, Hlm. 27

Penting untuk dicatat bahwa ayat diatas mensyaratkan bahwa karya-karya sosial harus untuk keridhaan Allah, yang merupakan persyaratan umum untuk setiap perbuatan baik dalam islam. Jadi, perusahaan harus memberikan pelayanan komunitas mereka hanya untuk Allah SWT, sebaliknya yang tidak akan diterima pada hari kiamat. Hal ini membuat keberangkatan dari pelayanan sosial perusahaan tradisional. Perusahaan biasanya melaksanakan layanan tersebut untuk mempromosikan bisnis mereka. Bagi mereka, seperti yang di sebutkan sebelumnya, tidak ada timbal balik tidak bertanggung jawab terhadap kepentingan sosial. Berdasarkan pernyataan diatas, CSR merupakan pemaknaan dan implementasi nilai-nilai sistem ekonomi Islam, yang salah satu poin terpentingnya harus merujuk pada perekonomian masyarakat secara luas. Berdasarkan paparan diatas, PTPN VII UKK Way Berulu menjadi menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena PTPN VII Way Berulu merupakan pabrik satu-satunya di pesawaran, Gedong Tataan yang sebagai percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan peran CSR merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan berupaya memberikan kontribusi dengan masyarakat sekitar. Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti tentang analisis pelaksanaan program kemitraan PTPN VII dan dampaknya terhadap pendapatan ekonomi masyarakat. Peran salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu kemitraan sebagai upaya meningkatkan kemampuan usaha mandiri perusahaan PTPN VII Way Berulu, lebih menarik lagi karena PKBL merupakan program CSR yang diatur oleh Pemerintah dan disusun sesuai dengan Undang-Undang, yang mana mendorong

rasa ingin tau peneliti mengenai bagaimana PKBL yang telah diatur sedemikian rupa tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat dan memajukan perusahaan itu sendiri. Permasalahan ini mengangkat judul “ Analisis pelaksanaan program kemitraan PTPN VII dalam Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan).⁶

Tindakan sosial sukarela akan menjamin adanya kesesuaian tindakan masing-masing partisipan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan bersama, sementara dalam tindakan ekonomi masing-masing partisipan lebih menyesuaikan tindakannya dengan nilai ekonomi yang di harapkan dari kemitraan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah An-Nisa :29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS:An-Nisa:29).⁷

Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam dilarang untuk tidak memakan harta saudaranya dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan yang baik maksudnya segala persaingan memperoleh rezeki sudah ada aturannya, ini menunjukan bahwa ketika seseorang sama-sama berusaha untuk memperoleh rezeki yang halal maka hal itu tidak dilarang oleh agama-agama dan tidak

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 surat Al-Baqarah ayat 177, Hlm. 27

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 surat An-Nisa ayat 29

melarang seseorang untuk mencari nafkah dengan cara apa pun sepanjang itu halal.⁸

Untuk mengatasi persaingan tidak sehat atau tidak seimbang antar pelaku usaha, maka pelaku usaha harus memperhatikan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sebagai pedoman dalam penerapan bisnis serta menghadapi persaingan antar pemilik bisnis yang sama.⁹ Kemudian di lanjutkan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor Per-05/MBU/2007. Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Menurut Suharto (2005), menyebutkan bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di seputar perusahaan yang keberadaannya telah memunculkan masalah sosial ekonomi yang tajam antara masyarakat perusahaan dengan penduduk lokal, dan kemiskinan struktural masyarakat setempat lewat eksploitasi dan perusakan lingkungan yang di lakukan oleh perusahaan.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat analisis peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian adalah

⁸HafizhDasuki dkk,*Loc. Cit.*

⁹Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2015), h.1.

¹⁰*JEP, Vol 3, No 2, Juli 2014*

1. Bagaimana peran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN VII UKK Way Berulu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap peran pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan yang di lakukan pada PTPN VII UKK Way Berulu?

E. TujuanDan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini mengkaji tentang tentang :

- a. Untuk mengetahui peran Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Perusahaan PTPN VII UKK Way Berulu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi di Desa Kebagusan kecamatan Gedong Tataan,Pesawaran
- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi islam dalam peran pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PTPN VII UKK Way Berulu Desa Kebagusan, kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran.

2. Manfaat Penelitian

- a. Pada tataran teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk bagaimana islam menganjurkan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas dan perusahaan itu sendiri maupun masyarakat luas

- b. Pada tataran praktis, adanya penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan penulis untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan study di fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- c. Bagi PTPN VII Way Berulu memberikan sumbangan pemikiran kepada PTPN VII UKK Way Berulu, untuk lebih peduli terhadap tanggung jawab perusahaan yang bersifat ekonomis seperti kemitraan atau hubungan kerja sama, agar tercapainya peningkatan profit perusahaan dalam ekonomi Islam

3. Penelitian Terdahulu

Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian kepustakaan. Menurut Prastowo kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.¹¹

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Murni dengan judul Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa Di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu, bahwa peranan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan

¹¹Prastowo, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.81.

atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara keseluruhan belum merata hasil pembangunan yang di rasakan masyarakat desa, tetapi telah menunjukkan bahwa adanya perubahan yang cukup berarti terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat serta keadaan sosial lingkungan ekonomi masyarakat, dengan program pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan fasilitas umum, peningkatan SDM.

2. Penelitian yang di lakukan oleh M. Iqbal Harori dengan judul Analisis Implementasi Program CSR PTPN 7 Unit Usaha Beringin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program CSR PTPN 7 Unit Usaha Beringin terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lubai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terjalin kontrak Kemitraan dengan PTPN 7 UU Beringin dan yang merasakan langsung pelaksanaan program bina lingkungan di sekitar tempat tinggalnya yang berjumlah 86 orang Kepala Keluarga. Lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar kantor PTPN 7 UU Beringin.
3. Penelitian yang di lakukan oleh Kartika Tribuana dengan judul Kemitraan Masyarakat Peternak Sapi Perah Dengan KUD “BATU” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Peternak Sapi Perah

Dalam penelitian ini terjadi kemitraan antara publik dan privat. Disini sektor publik adalah masyarakat peternak dan privatnya adalah koperasi, yang saling bekerjasama untuk meningkatkan kualitas dalam proses pembuatan susu, dan meningkatkan ekonomi perternak sapi perah. Masyarakat disini sebagai produsen susu yang selanjutnya dikelola oleh koperasi sebagai penetapan standar agar susu dapat diproses lebih lanjut untuk siap dipasarkan kepihak ketiga yaitu pabrik susu Nestle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlihat dalam kemitraan ini cukup berhasil karena dengan adanya kemitraan ini menguntungkan masyarakat dengan KUD “Batu”, masyarakat peternak bisa mewujudkan stabilitas perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan taraf pendidikan dan pembangunan rumah-rumah dan jalan yang bisa di rasakan oleh seluruh masyarakat, dan bagi KUD “BATU” yaitu dapat meningkatkan populasi sapi perah, dapat meningkatkan jumlah produksi susu dan dapat pemupuk modal yang ahkirnya dapat meningkatkan pelayanan pada para peternak, namun dengan demikian ada faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam meningkatkan ekonomi perternak sapi perah, Faktor penghambatnya antara lain manajemen peternakan relatif tradisional, sulitnya mendapatkan makanan ternak di saat musim kemarau dan para perternak yang kurang memperhatikan kebersihan kandang, hal ini di karenakan SDM para perternak yang masih kurang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan “ Analisis pelaksanaan program kemitraan PTPN VII dan dampaknya terhadap pendapatan ekonomi masyarakat” selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sisi sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Secara khusus, penelitian deskriptif bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena tertentu. Dalam hal ini penelitian akan menyajikan data serta menganalisis data-data yang di dapat untuk melihat atau mengetahui peran tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR) PTPN VII Way Berulu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak langsung berwujud angka, tetapi dalam bentuk konsep atau pengertian yang abstrak. Dimana dalam hal ini data yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah data-data keterangan mengenai analisis peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

b. Sumber Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang teliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Dalam hal, data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yakni di “PTPN VII UKK Way Berulu di Desa Kebagusan” yang berkenaan dengan peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu juga, penelitian ini menggunakan data sekunder dalam penyelesaiannya. Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam penelitian ini

penulis mendapatkan data sekunder dengan mengutip literatur dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian data-data resmi berbagai instansi daerah. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan diperoleh melalui perpustakaan mengenai pembahasan terkait dengan CSR untuk mencari konsep-konsep CSR yang dalam buku-buku, Al-Qur'an dan As-sunnah serta dari internet.¹²

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan buruh PTPN UKK Way Berulu, Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan kabupaten pesawaran Jumlah populasi pada Karyawan dan buruh sebanyak 15 orang yang di jadikan populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi terkecil yang dapat menggeneralisasi yang diambil dari sebagai sumber data dan dapat mewakili populasi.¹⁴

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau

¹²Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006 hlm.57

¹³ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 80.

¹⁴Sugiono., *Op. Cit.*, h. 81.

kriteria-kriteria tertentu, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan khususnya pengolahan karet mentah yang ada di Way Berulu, Pesawaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian ini ditujukan pada perusahaan PTPN UKK Way Berulu, Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan mencatat peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹⁵ Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Pengamatan (Observasi)

Adalah metode pengamatan langsung ke sasaran penelitian sistematis sesuai dengan fenomena-fenomena yang dikehendaki dengan maksud untuk mendapatkan data yang bersifat fisik yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview. Misalnya keadaan atau kondisi fisik perusahaan seperti karyawan, lingkungan kerja, proses produksi.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

¹⁵Susiadi, *Op. Cit.* h.91.

¹⁶Arikunto Suharsim, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, PT, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm.133

keterangan. Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada narasumber untuk di mintai keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Misalnya untuk mendapatkan data tentang sejarah singkat perusahaan, visi misi dan tujuan perusahaan, strategi yang digunakan perusahaan, data penjualan, dan jumlah karyawan.

c. Angket/Kuisisioner

Angket adalah cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.¹⁷

Metode ini digunakan untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat terkait dengan peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bentuk kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner dengan pertanyaan terbuka dimana Responden disediakan alternative jawaban dalam bentuk pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Metode ini diajukan kepada masyarakat sekitar PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan kecamatan Gedong Tataan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.¹⁸

¹⁷Suharsimi Arikunto, Op, Cit, Hlm. 120

¹⁸*Ibid.* Hlm 115.

5. Metode Pengolah Data

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (Rawdata) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁹

b. Rekontruksi Data

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁰

c. Sistematika Data (*Sistemizing*)

Bertujuan menempatkan dan mengurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²¹ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

d. Metode Analisis Data,

analisis data adalah cara untuk menguraikan dan memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-

¹⁹ *Ibid* h.122.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hlm.126

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004)* h.126.

komponen yang lebih kecil.²² Dalam hal ini data tersebut akan dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu “ Analisis pelaksanaan Dampak program kemitraan PTPN Dan dampaknya VII terhadap pendapatan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).

Setelah data terkumpul selanjutnya data akan diolah menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data Deskriptif yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Deduktif. Tindakan sosial sukarela akan menjamin adanya kesesuaian tindakan masing-masing partisipan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan bersama, sementara dalam tindakan ekonomi masing-masing partisipan lebih menyesuaikan tindakannya dengan nilai ekonomi yang di harapkan dari Kemitraan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah An-Nisa:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

²² Susiadi *Op.Cit* h.127

*membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS:An-Nissa:29)*²³

Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam dilarang untuk tidak memakan hartasaudaranya dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan yang baik maksudnya segala persaingan memperoleh rezeki sudah ada aturannya, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang sama-sama berusaha untuk memperoleh rezeki yang halal maka hal itu tidak dilarang oleh agama-agama dan tidak melarang seseorang untuk mencari nafkah dengan cara apa pun sepanjang itu halal.²⁴

Untuk mengatasi persaingan tidak sehat atau tidak seimbang antar pelaku usaha, maka pelaku usaha harus memperhatikan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sebagai pedoman dalam penerapan bisnis serta menghadapi persaingan antar pemilik bisnis yang sama.²⁵ Kemudian di lanjutkan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor Per-05/MBU/2007. Tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Menurut Suharto (2005), menyebutkan bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di seputar perusahaan yang keberadaannya telah memunculkan masalah sosial ekonomi yang tajam antara masyarakat perusahaan dengan penduduk lokal, dan kemiskinan struktural masyarakat

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 Surat *An-Nisa* Ayat 29, Hlm 27.

²⁴HafizhDasuki dkk,*Loc. Cit.*

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2015), h.1.

setempat lewat eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.²⁶

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Islam lebih menekankan kepada norma-norma agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Hal ini pastinya memiliki tujuan dalam hal kebajikan yang pelaksanaannya tidaklah mengandung unsur-unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan oleh Allah SWT berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdhah. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW,

“Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai dari pada melakukan dua puluh kali haji dan pada setiap hajinya menginfakan ratusan ribu dirham dan dinar”.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda,

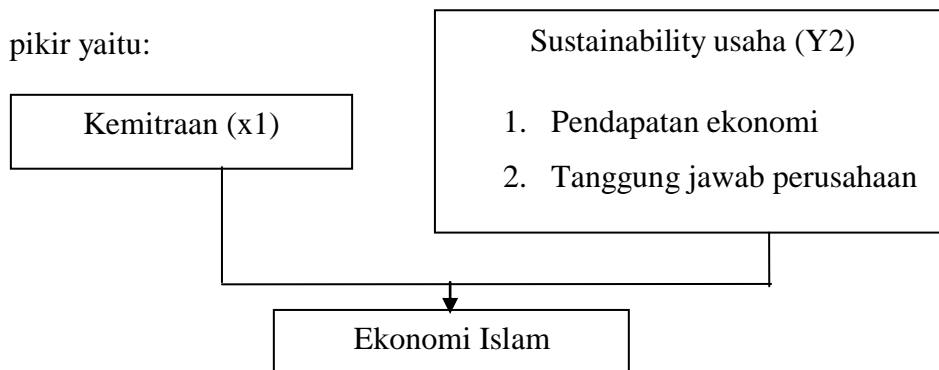
“Jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan tujuh puluh kali thawaf di Baitullah.”

Hadits di atas mengisyaratkan kepada kita bahwasannya betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai sosial di dalam kehidupan.

²⁶ JEP, Vol 3, No 2, Juli 2014

6. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas maksud dalam penelitian ini maka dibuatlah kerangka pikir yaitu:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Strategi persaingan usaha tidak hanya diatur oleh peraturan menteri Nomor Per-05/MBU/2007 namun juga terdapat dalam Ekonomi Islam. Hal ini melihat tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan maka perlu ditinjau dalam Ekonomi Islam yang berprinsip pada Al-Qur'an dan Hadis dan Pendapat para Ulama'. Tempat atau objek penelitian di PTPN VII Way Berulu pada pengelola perusahaan dan masyarakat sekitardikhususkan pada area Gedong Tataan, pesawaran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Definisi *Corporate Social Responsibility*

Secara konseptual, banyak pengertian tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam Hendrik *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antar perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.²⁷

Menurut Gunawan, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁸

Menurut Mu'man Nuryana, *Corporate Sosial Responsibility* adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan *Mengintegrasikan* kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan memangku kepentingan (*Stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Farmer dan Hogue menekankan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi

²⁷ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, 2008, Hlm 1

²⁸ Gunawan Wijaja dan Yaremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan bisnis perusahaan tanpa CSR*, forum sahabat, jakarta, 2008, Hlm 3.

perusahaan tidak hanya dapat menyediakan barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat.

Sedangkan menurut Busra Azheri *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan para *Stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada hukum yang berlaku.²⁹ Dari definisi *Corporate Social Responsibility* diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan komitmen perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan di wilayah kerja perusahaan tersebut dengan mengakomodir kepentingan ekonomi.

2. Kemitraan

a. Konsep Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.³⁰ Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha

²⁹*Ibid*, hlm.28

tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ian Linton yang mengatakan bahwa Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Menurut Anwar dalam Hafsah, pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan (*maximum social benefit*), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Hal ini didasari oleh perwujudan cita-cita pola kemitraan untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologi bersama petani golongan lemah yang tidak berpengalaman. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan atas dasar kepentingan bersama. Secara ekonomi, kemitraan didefinisikan sebagai:

1. Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian distribusi diantara dua pihak yang bermitra. (Burns, 1996 dalam Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 1998);
2. “*Partnership* atau *Alliance*” adalah suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau usaha yang sama-sama memiliki sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mencari laba. (Winardi, 1971 dalam Agribisnis Departemen Pertanian, 1998);
3. Kemitraan adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis mencari keuntungan. (Spencer, 1977 dalam Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 1998);
4. Suatu kemitraan adalah suatu perusahaan dengan sejumlah pemilik uang menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari perusahaan dan masing-masing menanggung liabilitas yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan. (McEachern, 1988 dalam Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 1998).

b. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

- 1) Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

- 2) Transparansi.

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

- 3) Saling menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

c. Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Berdasarkan pendekatan *cultural*, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampun aspek- aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
3. Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
5. Memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu:

1. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar.
3. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
5. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

d. Pola – Pola Kemitraan

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Wibisono, Kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/ masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, diantaranya:

1) Pola kemitraan kontra produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan

komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

2) Pola Kemitraan Semiproduktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* dipihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau *public relation*, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

3) Pola Kemitraan Produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui *stock ownership* Program.

B. Tanggung Jawab Sosial (CSR) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif islam, *Corporate Social Responsibility* merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai pancaran dari ajaran etika yang mulia. Ihsan ialah merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain demi mendapatkan Ridho Allah Swt. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan islam. Allah adalah pemilik mutlaq (*Haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*Temporer*) yang berfungsi sebagai amanah.³¹ Maka dengan mengemban amanah individu maupun kelompok harus dapat menjadi *khalifah* yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat. *Corporate Social Responsibility* ternyata selaras dengan pandangan islam tentang

³¹ Muhammad Djakfar, *Etika bisnis dalam perspektif islam*, Malang Press, 2007, Hlm 160

manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial dapat dipresentasikan dengan aksioma yaitu Kesatuan (*Tauhid*), Keseimbangan (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Fre Will*) dan Tanggung Jawab (*Responsibility*).³²

Menurut Muhammad Djakfar, implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadi ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif islam dengan CSR secara universal yaitu :

a. Al- adl

Islam telah mengharamkan setiap hubungan atau usaha yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis etika perusahaan mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas didunia bisnis, islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi , keseimbangan baik melarang segala bentuk penipuan, *Gharar* (spekulasi) *Najzi* (iklan palsu), *Ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain. Disamping itu keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Dalam Al-Qur'an surat Huud ayat 85 telah menegaskan sebagai berikut :

³² Syed Nawab Haidar Naqwi, Menggagas Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hlm 37.

وَيَقُومِ أَوْفُوا أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.(QS; Hud :85).³³

b. Al- ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi *Corporate Social Responsibility* dengan semangat ihsan akan memiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena Atas Ridho Allah Swt. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 menerangkan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS:Al-Baqarah 195).³⁴

Ihsan adalah perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *Beaty* dan *Perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang di landasi unsur ihsan yang dimaksudkan sebagai proses

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 surat Huud Ayat 85.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 surat Al-Baqarah 195.

niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *Stakeholders*.

c. Manfaat

Konsep ihsan yang telah dijelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Konsep manfaat dalam *Corporate Social Responsibility* lebih dari aktifitas ekonomi. CSR sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait untuk *Philantropi* dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan. Dijelaskan dalam hadis diriwayatkan dari jabir berkata Rosulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah.

وَأَخَيْرُ الْإِنْسَانِ أَنْفَعُهُ لِلنَّاسِ

Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang paling bermanfaat bagi manusia lain (HR. Thabrani dan Daruquthni).³⁵

d. Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan i'tikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan. Amanah dalam perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada berhak, serta amanah dalam pemberdayaan pajak, pembayaran karyawan, dan lain-lain. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan

³⁵HR. Thabrani dan Daruquthni

melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. Al-Qur'an surat An-nisa ayat 58 telah menjelaskan sebagai berikut ;

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ *
 ﴿٥٨﴾ بِصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yangberhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(QS:An-Nisa:58).*³⁶

C. Sejarah *Corporate Social Responsibility*

Pada awalnya, konsep *Corporate Social Responsibility* muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan. *Corporate Social Responsibility* yang kini makin banyak di implementasikan berbagai macam perusahaan, mengalami Evolusi dan *Metamorphosis* dalam rentang waktu yang cukup lama. Konsep ini tidak terlahir begitu saja, akan tetapi melewati berbagai macam tahapan terlebih dahulu. Konsep *Corporate Social Responsibility* yang dikenal saat ini baru dikenal pada awal tahun 1970-an, namun konsep tanggung jawab sosial yang sudah dikemukakan oleh Horward R. Bowen pada tahun 1953, yang merumuskan konsep tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pelaku bisnis, sebagai kelanjutan dari pelaksanaan berbagai kegiatan derma, sebagai wujud kecintaan manusia terhadap sesama manusia yang banyak dilakukan para

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 surat An-Nisa ayat 58, Hlm 27.

pengusaha ternama pada akhir abad kesembilan belas sampai periode tahun 1930.³⁷

Tahun 1998, konsep *Corporate Social Responsibility* semakin populer ternama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line In 21 St Century Business* (1998), karya Jhon Elkington. Dia mengemas *Corporate Social Responsibility* dalam tiga focus 3p yang merupakan singkatan dari *Profit, Planet Dan People*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan (*planet*), dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Pada tahun 2002, *World Summit Sustainable Development* di Johannesburg memunculkan konsep sosial *Responsibility* yang menggiringi dua konsep sebelumnya, yaitu *Economics Dan Environment Sustainability*.³⁸

Corporate Social Responsibility saat ini ditandai dengan adanya inisiatif standar cara internasional dalam bentuk ISO, yaitu 26000. ISO 26000 menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan yang saat ini menjadi aspek dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.³⁹

³⁷ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility*, transformasi konsep sustainability manajemen dan implementasi di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 5.

³⁸ Rahman, Panduan Lengkap *Corporate Social Responsibility*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, hlm.81-82

³⁹ *Ibid*, hlm 37.

D. Jenis-Jenis *Corporate social responsibility*

a. *Corporate Social Responsibility* Pendidikan

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak biasa diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR. Maka tidak mengherankan pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam penerapan *Corporate Social Responsibility*. Salah satu contoh program *Corporate Social Responsibility* dalam pendidikan yang cukup baik dan bisa dijadikan contoh adalah PT. HM Sampoerna Tbk. Sebagai perusahaan rokok terbesar di Indonesia, perusahaan ini telah membentuk yayasan sendiri yang diberi nama Poetra Sampoerna Foundation. Dengan pengelolaan yang sangat profesional, program-program pelayanan sosial dalam bidang pendidikan menjadi ciri khas yang ditempatkan oleh Poetra Sampoerna Foundation adalah dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia yang berprestasi dan tidak mampu.⁴⁰

b. *Corporate Social Responsibility* Ekonomi

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi perhatian penting dalam pemangku kebijakan *Corporate Social Responsibility*. Maka program peningkatan pendapatan masyarakat sering kali menjadi program andalan setiap perusahaan dalam penerapan *Corporate Social Responsibility*. Penerapan pendapatan ekonomi biasa diterapkan dengan

⁴⁰ Edi Suharto, CSR dan COMDEV, *Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung, Oktober, 2010, Hlm. 137-138

mengembangkan lembaga keuangan mikro, bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, pemberdayaan ekonomi.⁴¹

c. *Corporate Social Responsibility* Modal Sosial

Berdirinya sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat pasti akan menimbulkan dampak bagi masyarakat tersebut. Kehadiran perusahaan di harapkan sedikit banyak akan mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat sekitarnya baik melalui perekrutan tenaga kerja maupun sumbangsih perusahaan secara langsung terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya CSR terhadap masyarakat sekitar, perusahaan sebenarnya terbantu dalam hal mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam berusaha yang didapat dari masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial terkait dengan upaya perusahaan dalam mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Tanggung jawab sosial ini dijaga perusahaan antara lain dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat penegak hak asasi manusia, pembangunan regional suatu negara dan melakukan persaingan yang sehat.⁴²

d. *Corporate Social Responsibility* Lingkungan

Lingkungan yang baik dan terpelihara adalah harapan semua pihak. Belakangan ini dunia sangat di sibukkan dengan masalah global warming yang mengancam kehidupan manusia. Dalam masalah ini salah satu pihak yang disalahkan ialah perusahaan. Aktifitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya global warming, banyak bantuan dari masyarakat, LSM, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan memperhatikan

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 158

⁴² Gunawan Widjaja dan Yaremia, Op. Cit, Hlm, 45-46

masalah lingkungan ini menguatkan argument bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan ini dapat dijaga oleh perusahaan antara lain dengan cara menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas buang, mengimplementasikan sistem manajemen resiko lingkungan yang efektif dan lain-lainnya.

e. *Corporate Social Responsibility* Kesehatan

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target *Millenium Goal* (MDG). Dengan demikian, program-program *Corporate Social Responsibility* sudah sebaiknya tidak meninggalkan programnya di bidang kesehatan bisa dilakukan banyak cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan apa semestinya dilakukan daerah setempat. Contohnya, untuk daerah-daerah tertentu salah satu kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kondisi kesehatan manusia, termasuk rendahnya fasilitas kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil. Program CSR yang bisa di terapkan seperti yang dilakukan oleh PT. Indo Tumbang Raya Megah Tbk, yang secara rutin melakukan medical care kepada masyarakat desa dampingan terutama yang kurang mampu dan anak-anak. Perusahaan ini juga memberikan program-program pengobatan gratis bagi anak-anak sekolah dasar dan bantuan makanan tambahan serta bantuan peralatan posyandu dan perbaikan puskesmas di daerah operasional mereka.⁴³

⁴³*Ibid*, Hlm. 146-147

Dari uraian jenis-jenis program *Corporate Social Responsibility* diatas, penelitian menyimpulkan secara garis besar bahwa jenis-jenis program *Corporate Social Responsibility* terdiri dari tiga jenis yaitu :

- 1) Sosial, didalamnya meliputi pendidikan meliputi pendidikan, pelatihan, kesehatan, penguatan terhadap kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan, kesejahteraan karyawan, kesejahteraan sosial, olah raga, agama, wanita, kebudayaan dan sebagainya.)
- 2) Ekonomi, didalamnya meliputi kewirausahaan, kelompok usaha bersama atau unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), Agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi usaha produktif lainnya.
- 3) Lingkungan, didalamnya meliputi penghijauan reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi seefisien mungkin.

E. Indikator *Corporate Social Responsibility*

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *Stakeholders* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan usaha belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti dibenarkan perusahaan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan usahanya yang

mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap *Stakeholders* nya dan lingkungan dimana perusahaan itu melakukan aktivitas usaha nya.⁴⁴

Jhon Elkingston's mengatakan CSR terdapat tiga aspek yang meliputi kemakmuran ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Dari ketiga aspek ini diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Aspek	Muatan
1	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan, kesejahteraan sosial, olah raga, pemuda, wanita, agama,kebudayaan.
2	Ekonomi	Kewirausahaan, reklamasi jalan, kelompok usaha bersama atau UMKM, agrobisnis, pembukaan lapangan pekerjaan, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lainnya.
3	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi jalan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien

Sumber : Hardiyansyah dan Muhammad Iqbal

Disamping itu ada enam pilihan bagi perusahaan yang melakukan aktivitas berkaitan dengan masalah sosial sekaligus juga komitmen dari CSR.

a. *Cause Promotion*

Ialah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk memberikan kontribusi berupa dana dan penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

⁴⁴ Sonny Kerap, Etika Bisnis, Tuntutan Relevansinya, Yogyakarta : Kanisius, 1998 Hlm 122.

b. *Cause Related Marketing*

ialah bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan beberapa persen dari pendapatannya yang diperoleh perusahaannya sebagai donasi bagi permasalahan sosial tertentu atau produk tertentu.

c. *Corporate Social Marketing* yaitu upaya untuk membantu mengembangkan dan sekaligus mengimplementasikannya dalam bentuk kampanye dengan fokus mengubah perilaku negatif.

d. *Corporate Philanthropy* yaitu inisiatif dari perusahaan dengan memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, baik dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tunai.

e. *Community Volunteering* yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan langsung oleh perusahaan dalam memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya untuk sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat.

f. *Socialy Responsible Business Practices* Yaitu inisiatif perusahaan untuk mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sebuah komunitas dan melindungi lingkungan.

Pemerintah sebagai institusi yang mewakili negara dan masyarakat, mempunyai kepentingan untuk memperkuat program kemitraan, melalui kementerian Negara nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Usaha Kecil Serta Bina Lingkungan (PKBL) Antara lain “Persero terbuka dapat melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan

berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS). Sedangkan mengenai dana sumber dananya yaitu :

1. Dana kemitraan bersumber dari
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%
 - b. Jasa administrasi pinjaman atau margin, bagi hasil, bunga deposito, jasa giro, dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional
 - c. Pelimpahan dana program kemitraan dari yang lain jika ada.
2. Dana program lingkungan bersumber dari antara lain
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)
 - b. Hasil bunga deposito dan jasa giro dari dana bina lingkungan
 - c. Beban pembinaan bersifat hibbah dan besarnya maksimal 20% dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Ruang lingkup bantuan program bina lingkungan sebagai berikut ; bantuan korban bencana alam, pendidikan, atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana atau prasarana umum serta bantuan sarana ibadah, dan pelestarian alam

F. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan salah seseorang pakar Alyson Warhust. Beliau menjelaskan ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR antara lain :

- a. Prioritas perusahaan yaitu perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan

berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membantu kebijakan, program dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

b. Manajemen Terpadu

Manajer sebagai pengendali dan mengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.

c. Proses Perbaikan

Setiap kebijakan, program dan kinerja sosial, harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial secara global.

d. Pendidikan Karyawan

Karyawan sebagai *Stakeholders* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan

e. Pengkajian

Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya

f. Produk dan Jasa

Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara social.

g. Informasi Public

Memberikan informasi dan perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan atas suatu produk barang atau jasa

h. Fasilitas operasi yakni mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari kegiatan tersebut

i. Penelitian yaitu penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi atau meniadakan dampak negatif kegiatan yang dimaksud

j. Prinsip pencegahan : memodifikasi manufaktur, pemasaran dan penggunaan atas barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir

k. Kontraktor dan Pemasok, siaga menghadapi darurat, Transfer Best Practice memberikan sumbangan, keterbukaan serta pencapaian dan pelaporan

G. Etika Bisnis Dan Kinerja Perusahaan

Para pebisnis kapitalis beranggapan bahwa hubungan antara bisnis dan etika adalah kontradiktif karena ada konflik kepentingan di antara keduanya dalam mengejar keuntungan yang maksimal. Ketika etika berlawanan arah dengan keuntungan perusahaan, pebisnis kapitalis akan memilih keuntungan dan meninggalkan etika bisnisnya dengan menghalalkan segala cara. Akan tetapi bagi perusahaan yang memperhatikan etika maka, perusahaan akan terus hidup dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pelaksanaan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi salah satu *Sustainable Competitive Advantage*. Contoh perusahaan yang menerapkannya

adalah Shell, BP, GE, Johnson & Johnson. Bagi perusahaan yang beranggapan bahwa keuntungan finansial adalah segala-galanya maka, mereka akan menganggap bahwa moralitas atau etika tidak cocok dengan bisnis sehingga perusahaan tidak akan merasa memiliki tanggung jawab sosial karena bisnis adalah bisnis, tak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat. Kalau perusahaan berada dalam persaingan yang ketat, mereka akan melakukan apapun untuk meningkatkan keuntungannya sekalipun mengurbankan yang lainnya. Misalnya untuk menekan biaya operasional, perusahaan memberikan upah di bawah standar, tidak menjaga keselamatan pekerja, memanipulasi laporan keuangan dan lain-lain, dimana hal itu pada akhirnya akan merugikan masyarakat atau negara akan dianggap sebagai sah-sah saja. Tetapi di era global seperti sekarang ini, dimana informasi mudah sekali untuk diakses maka, akan sulit bagi perusahaan untuk bertahan lama kalau dia melanggar etika bisnis karena kekuatan dalam dunia bisnis sekarang ini bukan lagi menjadi monopoli individu atau perusahaan tertentu. Konsumen, masyarakat, LSM dan sebagainya dengan dukungan akses internet yang ada serta meningkatnya tuntutan akan transparansi, membuat pelaku bisnis harus hati-hati. Terpaksa atau tidak, mereka harus menjalankan etika bisnis agar bisnis tidak kolaps akibat ditinggalkan konsumen dan hilangnya kepercayaan para pemegang kepentingan (*Stakeholder*).

Kenyataan menunjukkan bahwa, masih ada yang menganggap bahwa ukuran kinerja adalah untung rugi dalam bentuk uang. Mereka memandang bisnis adalah bagaimana mencetak laba yang besar karena laba yang tinggi merupakan tanda kesuksesan, laba yang lebih rendah berarti kinerjanya buruk.

Tetapi kurun waktu belakangan, isu mengenai etika bisnis menggugah kesadaran banyak pihak khususnya para pelaku bisnis. Mereka menyadari, bisnis yang baik merupakan dampak dari kinerja perusahaan yang baik, dimana kinerja yang baik merupakan hasil dari penerapan etika yang baik oleh organisasi perusahaan. Hubungan antara etika bisnis dan kinerja finansial telah menjadi isu penting dalam dunia bisnis selama kurang lebih 25 tahun. Meskipun sejumlah peneliti telah menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara etika dan kinerja finansial, sedikit peneliti lainnya menemukan bahwa hubungan antara keduanya bisa jadi terbukti atau tidak terbukti. Menurut Bernard Schwab, menjadi etis tidaklah mudah, dan bisa jadi mahal karena perusahaan harus kehilangan uang untuk menjalankan CSR (*Corporate Social Responsibility*), disamping itu perusahaan juga harus melakukan pelatihan kode etik atau program-program internal lainnya untuk memperkuat etika di perusahaan. Jika keuntungan menjadi tujuan perusahaan satu-satunya, maka hal itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah apakah dengan menjadi perusahaan yang etis akan meningkatkan keuntungan finansial dalam jangka panjang ? Apakah kinerja finansial akan menjadi lebih baik dengan menjadi perusahaan yang etis dan bertanggung jawab ? Menurut pendiri General Electric, Reginald Jones, kinerja organisasi dengan etika sangat berhubungan. Begitupun dengan hasil studi dari The Performance Group, sebuah konsorsium yang terdiri dari Volvo, Unilever, Monsanto, Imperial Chemical Industries, Deutsche Bank, Electrolux dan Gerling, menemukan bahwa pengembangan produk yang ramah lingkungan dan peningkatan *Environ Mental Compliance* bisa menaikkan EPS

(*Earning Per Share*) perusahaan, mendorong keuntungan dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan kontrak atau persetujuan investasi. Selain mempengaruhi kinerja, etika perusahaan juga mempengaruhi kehidupan sosial di lingkungan perusahaan yang bisa berdampak pada kinerja perusahaan secara umum. Schwepker, Scott J. Vittel dan Anurson, menemukan adanya hubungan yang positif antara penerapan etika dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja bisa berupa kepuasan terhadap kompensasi, atasan, promosi, rekan kerja dan lain-lain. Ketika etika sudah terinstitusionalisasikan maka, pekerja diharapkan akan diperlakukan dengan adil baik dalam kompensasi, promosi maupun penyelesaian konflik. Dengan demikian, para pekerja akan mendapatkan kepuasan kerja sehingga mereka akan berkinerja lebih produktif dalam mendukung tujuan perusahaan. Oleh karena itu agar perusahaan bisa eksis dalam jangka panjang maka, perusahaan harus menerapkan etika dalam bisnisnya. Dengan adanya etika, para pelanggan akan lebih percaya pada perusahaan. Kepercayaan ini akan menimbulkan komitmen dan loyalitas. Sedangkan para pekerja akan setia bekerja melayani perusahaan yang bersikap adil dan menghargai pekerja. Intinya, perusahaan yang menerapkan etika akan memiliki keunggulan kompetitif dibanding perusahaan yang tidak beretika.

Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu pada kewajiban organisasi untuk melindungi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama pada pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*), lingkungan alam, serta kesejahteraan secara umum. Michael Porter, Christensen dan Rosa beth Moss Kanter dari Harvard Business School berhasil membuktikan bahwa program-program CSR

yang disinergi kan dengan strategi perusahaan akan memberi kan dampak yang jauh lebih besar kepada masyarakat dan perusahaan sendiri.

H. Etika Dalam Perspektif Islam

Islam Menempatkan Nilai Etika Di Tempat Yang Paling Tinggi. Pada Dasarnya, Islam Diturunkan Sebagai Kode Perilaku Moral Dan Etika Bagi Kehidupan Manusia, Seperti Yang Disebutkan Dalam Hadis: “ Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Yang Mulia”. Terminologi Paling Dekat Dengan Pengertian Etika Dalam Islam Adalah Akhlak. Dalam Islam, Etika (Akhlak) Sebagai Cerminan Kepercayaan Islam (Iman). Etika Islam Memberi Sangsi Internal Yang Kuat Serta Otoritas Pelaksana Dalam Menjalankan Standar Etika. Konsep Etika Dalam Islam Tidak Utilitarian Dan Relatif, Akan Tetapi Mutlak Dan Abadi. Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al- Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi kredit. Syed Nawab Haidar Naqvi dalam buku “Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami”, memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu, tauhid, keseimbangan (*keadilan*), kebebasan dan tanggung jawab. Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, dalam berbisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan

dan dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan.

Keseimbangan dan keadilan, berarti, bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (*Ekstrim*) dalam mengejar keuntungan ekonomi. Kepemilikan individu yang tak terbatas, sebagai- mana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan. Dalam Islam, Harta mempunyai fungsi sosial yang kental. Kebebasan, berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah- kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, "semua boleh kecuali yang dilarang". Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pertanggungjawaban, berarti, bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Sedangkan pedoman bisnis menurut Imam Ibnu Taymiyyah dalam kitab Al Hisbah antara lain adalah pertama, sempurna dalam timbangan. "Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain ia minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".

Kedua, hindari penipuan/kecurangan. Diri- wayatkan dari Hakim bin Hizam r.a. dia berkata Rasulullah saw pernah bersabda :

“ Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya maka jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikan cacat yang ada dan berkata dusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi (HR. Muttafaq Alaihi)”.

Ketiga, hindari kontrak bisnis yang tidak sah (*illegal*). Kontrak yang terkait dengan riba dan judi seperti jual beli spekulatif (*bay al-gharar*), membeli bayi ternak yang masih dalam kandungan (*mulamasa*), menawar tinggi untuk menaikkan harga bukan berniat untuk membeli (*najas*). Keempat, kondisi ketidaksempurnaan pasar. Diriwayatkan Abdul lah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah pernah bersabda :

“Janganlah memperjualbelikan barang yang sedang dalam proses transaksi dengan orang lain dan janganlah menghadang barang dagangan sebelum sampai di pasar/sebelum penjual mengetahui harga yang berlaku di pasar.”

I. Prinsip Dasar Etika Islami Dan Prakteknya Dalam Binis

Ada lima prinsip yang mendasari etika Islam yaitu :

1. *Unity* (Kesatuan)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Prakteknya dalam bisnis :

- a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya

- b. Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT
- c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis :

- a. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan
- b. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

3. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak)

Kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya, seperti yang dijelaskan dalam QS al- kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهُمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

Jadi, jika seseorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Aplikasinya dalam bisnis :

- a. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan).
- b. Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. Seperti yang dijelaskan dalam QS al-maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

4. Responsibility (Tanggung Jawab)

Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Aplikasinya dalam bisnis :

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- b. *Economic return* bagi pemebri pinajam modal harus dihitung berdasarkan perolehan ke-untungan yang tidak dapat dipastikan jumlah-nya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sisitem bunga.
- c. Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, system ijon, dan

sebagainya

5. *Benevolence* (Kebenaran)

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali :

- a. Memberikan zakat dan sedekah.
- b. Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban- utangnya.
- c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- d. Membayar utang sebelum penagihan datang.
- e. Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
- f. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang.
- g. Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- h. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

J. Konsep Pendapatan Masyarakat

1. Pengertian Pendapatan Masyarakat

Dalam kamus manajemen pendapatan adalah ruang uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan atau upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memperkerjakan kepada pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.⁴⁵ Menurut Adiwilaga, tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang, yang diterima atau yang dihasilkan suatu masyarakat tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat apada suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk melihat keadaan ekonominya masyarakat tertentu. Dalam islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan syar'i islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagian suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Pendapatan per kapita (*Income*) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, yang biasanya satu tahun pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu di bagi dengan jumlah penduduk suatu negara tersebut.⁴⁶ Abdullah

⁴⁵ M.Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (penerjemah: Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar, SE), Cet 1, 1999, Hlm. 361

⁴⁶ [Http:// 110.138.206.53/Bahan Ajar/Modul_Online/Ekonomi/MO/Eko202_04. Html](http://110.138.206.53/Bahan_Ajar/Modul_Online/Ekonomi/MO/Eko202_04.Html)
Akses 22 september 2018

juga mengemukakan “Bahwa pendapatan perorangan dibedakan atas pendapatan asli dan pendapatan umum”. Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung turut serta dalam proses produksi barang. Sedangkan pendapatan turunan adalah pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung turut serta dalam proses produksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB Perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan perkapita, semakin makmur negara tersebut.

2. Kegunaan pendapatan perkapita

Sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara, pendapatan perkapita dihitung secara berkala, biasanya satu tahun. Manfaat dari perhitungan per kapita antara lain :

- a. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.
- b. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dari pendapatan perkapita masing-masing negara dapat dilihat tingkat kesejahteraan tiap negara. Pada daftar pendapatan per kapita masing-masing negara dilihat tingkat kesejahteraan tiap negara.

- c. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan perkapita dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan apakah pendapatan perkapita suatu negara rendah, sedang ataupun tinggi
- d. Sebagai data untuk mengambil suatu kebijakan dibidang ekonomi. Pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil lahan pertimbangan serta mengambil langkah dibidang ekonomi.⁴⁷

Tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan yang absolut, jika distribusinya pendapatan konstan, semakin tinggi pendapatannya konstan, semakin tinggi pendapatan perkapita yang ada maka akan semakin rendah jumlah kemiskinan. Akan tetapi sebagaimana telah diungkapkan, tingginya tingkat pendapatan perkapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan. Pemahaman terhadap kadar dan jangkauan distribusi pendapatan merupakan landasan dasar bagi setiap analisis masalah kemiskinan di negara-negara yang berpendapatan rendah.⁴⁸

3. Indikator Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan usaha, pangkat dan jabatan pekerjaan, tingkat pendidikan umum, produktivitas, prospek usaha, permodalan dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menjadi

⁴⁷<http://id.shvoong.com/Business-Management/2155639-definisi-dan-kegunaan-pendapatan-kapita/ixzz2ZGdwnHNnD>, AKSES, 24 MEI 2013

⁴⁸ Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2007, Hlm. 30

penyebab perbedaan tingkat pendapatan penduduk. Indikatornya distribusi pendapatan yang akan memberikan petunjuk aspek pemerataan pendapatan yang telah tercapai. Asumsi ini menjadi acuan dalam kajian untuk mengukur pendapatan masyarakat.⁴⁹

Besarnya pendapatan dalam penelitian ini adalah seberapa besar uang yang diperoleh oleh seseorang dalam satu bulan berdasarkan jenis pekerjaannya. Tingkat pendapatan masyarakat salah satu indikator yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, bahkan tingkat pendapatan merupakan faktor penting dalam kaitannya terhadap kualitas ekonomi masyarakat karena tingkat pendidikan yang tinggi jika tidak di sertai dengan tingkat pendapatan yang memadai tentu tidak mendukung terhadap terciptanya ekonomi masyarakat yang memadai.⁵⁰

Dalam islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari'at islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang telah di lakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan pangan,

⁴⁹ Gini Ratio, *Usi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyu Asin*, Jurnal Ekonomi, 2007, Hlm 1, [Http://Www.DistribusiPendapatanMasyarakat.Id](http://Www.DistribusiPendapatanMasyarakat.Id). Akses B24 Mei 2013

⁵⁰ Yusup Wibisono, *Ekonomi Masyarakat*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2008, Hlm.

sandang, papan, dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nishab) adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru di kaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁵¹

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itulah Allah swt akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai amal atau kerja sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surat An-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[839] Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.(QS:An-Nahl:97).⁵²

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Islam member perkenankan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk

⁵¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 132

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 surat An-Nahl ayat 97

mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS Al-Balad ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. (Al-Balad:4).*⁵³

Islam juga memberikan penjelasan tentang upah kepada upah seseorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan (adil) dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu memang dilarang melakukan eksploitasi tenaga kerja seseorang pekerja. Oleh karena itu dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah atau jenis pekerjaan yang di lakukan.⁵⁴ Pemerintah sebagai institusi yang mewakili negara dan masyarakat, mempunyai kepentingan untuk mendapatkan kebijakan pendapatan guna menjamin keberlangsungan hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya, yakni dengan mengarahkan agar penentuan besarnya upah mengacu kepada terpenuhinya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan pengupahan, maka pemerintah mengeluarkan ketetapan upah minimum sebagai suatu keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan KHM kepada pekerja pekerja yang paling rendah tingkatannya. Yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan terendah terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap. Besarnya upah pokok dan

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 surat *Al-Balad* ayat 4

⁵⁴ Muhammad , M.Ag, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, BEFE. Yogyakarta, 2005 Hlm. 313

tunjangan tetap didasarkan kepada kebutuhan hidup minimum harus terpenuhi dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selanjutnya berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI NO.Kep-226 / MEN / 2000 pasal 3 yaitu upah minimum terdiri dari “ upah minimum kabupaten/ kota (UMK Kab/ Kota)” dalam pengaturan pengupahan biasanya ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut di anggap batal oleh hukum yang berlaku dan perusahaan bisa di kenakan sanksi yang tegas.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an Ali Imran 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهْمٌ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.(QS:Ali-Imran:159).⁵⁵

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 surat Ali-Imron ayat 159

Perlindungan pengupahan bagi pekerja meliputi upah minimu, upah kerja lembur, upah tidak termasuk kerja karena sakit, upah tidak termasuk karena melakukan pekerjaan lain diluar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Untuk minimum ini hanya berlaku sektor usaha formal dan tidak untuk usaha informal (pekerja bebas di pertanian dan non pertanian). Sehingga upah yang diperoleh pada sektor informal ini dapat melebihi upah minimum atau jauh di bawah upah minimum. Dalam islam penentuan kadar dan jumlah upah yang harus diberikan kepada karyawan tidak hanya berdasarkan kekuatan pasar (*Supply And Demand*). Yang terkadang merugikan salah satu pihak. Upah yang diberikan kepada karyawan harus mencapai (*had al-kifayah*) batas kecukupan, yakni kecukupan kebutuhan diri dan keluarga. Proses pembayaran upah tersebut harus utuh tanpa adanya unsur penundaan sengaja.⁵⁶ Seperti dalam Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ۗ

.tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS:Ath-Thalaq:6).⁵⁷

⁵⁶ Said Sa'ad Marathon, *Ekonomi Islam*, Jakarta, 2004, Hlm. 50

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung : 2010 surat Ath- Thalaq ayat 6

BAB III **LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian PTPN VII Ukk Way Berulu

1. Sejarah berdirinya PTPN UKK Way Berulu

Perusahaan perseroan PT Perkebunan Nusantara (PTPN VII) Unit Usaha Kedaton (UU Keda) dan Unit Usaha Way Berulu(UU Wabe) adalah perkebunan yang berasal dari pengambilalihan perusahaan milik Belanda. Pengambilalihan dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 03 Desember 1957. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12/1996, dengan Akte Notaris Haris Kamil SH No. 40/1996, perihal pendirian perusahaan PTPN VII (Persero), UU Keda dan UU Wabe secara otomatis menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). Perusahaan perkebunan milik pemerintah Belanda dikelola oleh Watering Luber dan Rotterdam yang berada di Sumatera bagian Selatan. Perkebunan yang dikelola oleh Watering Luber dan Rotterdam terdiri dari Perkebunan Kedaton, Perkebunan Way Berulu, Perkebunan Way Lima, Perkebunan Bergen, Perkebunan Tulung Buyut, Perkebunan Rejosari, Bekri, Musi Landas, dan Perkebunan Trikora. Tahun 1958 perusahaan tersebut diambil-alih oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI No. 68 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.⁵⁸

Tahun 1962 dilakukan pengelompokan perkebunan menjadi dua wilayah kerja pengelolaan yaitu wilayah kerja distrik Way Sekampung dan wilayah kerja distrik Way Seputih. Selanjutnya perusahaan tersebut

⁵⁸Observasi pada tanggal 22 Oktober 2018

dikelompokkan kembali berdasarkan komoditas yang dibudidayakan oleh masing-masing unit usaha sesuai dengan PP No. 19 tahun 1959 tentang pengelompokan jenis usaha. Perusahaan perseroan PT Perkebunan Nusantara (PTPN VII) Unit Usaha Kedaton (UU Keda) dan Unit Usaha Way Berulu (UU Wabe) berada dalam kelompok perkebunan wilayah kerja pengelolaan distrik Way Sekampung dengan jenis komoditas yang diusahakan adalah tanaman karet. Perusahaan perseroan PT Perkebunan Nusantara (PTPN VII) UU Keda dan UU Wabe pada awalnya memproduksi *Ribbed Smoke Sheet* (RSS). Kemudian pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mendirikan pabrik pengolahan karet remah *Standard Indonesian Rubber* (SIR), mulai dioperasikan pada tahun 1982 dan produksi *Ribbed Smoke Sheet* (RSS) di penghentikan. Tahun 1988 pemerintah Indonesia mendirikan pabrik pengolahan lateks pekat di PTPN VII (Persero) Unit Usaha Kedaton (UU Keda) dan Unit Usaha Way Berulu (UU Wabe) yang mulai dioperasikan pada pertengahan tahun 1989.

2. Visi dan Misi PTPN UKK Way Berulu

Visi dan Misi Perusahaan perseroan PT Perkebunan Nusantara (PTPN VII) yang tersebar menjadi lima unit usaha berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan, memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi perusahaan

Menjadikan perusahaan agribisnis dan agroindustri yang tangguh dan berkarakter global.

b. Misi perusahaan

1. Menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, teh dan tebu.
2. Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti mengarah ke integrasi vertikal.
3. Menggunakan teknologi budidaya dan proses yang efisien dan akrab dengan lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar baik untuk pasar domestik maupun internasional.
4. Memperhatikan kepentingan *Shareholders* dan *Stakeholders*, khususnya pekerja mitra tani, pemasok, dan mitra usaha, untuk bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuhkan kembangkan perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero).

c. Tujuan Perusahaan

1. Melaksanakan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang sector industri yang sesuai dengan prinsip perusahaan kuat, ramah lingkungan serta tumbuh dalam skala usaha yang ekonomis
2. Menjadikan perusahaan yang *Profitable*, makmur, dan berkelanjutan sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional maupun nasional
3. Mencapai hasil produksi dan berdaya saing dengan komitmen yang menyeluruh terhadap standar kerja serta produktivitas yang tinggi sehingga perusahaan mencapai pertumbuhan yang langgeng dan menguntungkan bagi usaha serta tercapainya nilai jangka panjang.

4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dengan membuka lapangan pekerjaan alternatif serta pengangguran.

d. Nilai nilai budaya perusahaan

Budaya perusahaan yang tumbuh yaitu mengutamakan kebenaran dan material melalui kerja sama, keteladanan, keterbukaan, serta kebersamaan dalam meningkatkan produktifitas

e. Struktur organisasi PTPN VII UKK Way Berulu

Adapun struktur organisasi yang ada pada perusahaan. Struktur organisasi di lingkungan unit usaha ditetapkan oleh pihak direksi PTPN VII (Persero) termasuk pimpinan dan stafnya. Perubahan struktur dan jenjang kepangkatan personalia disesuaikan dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Berdasarkan profil perusahaan tahun 2012, jenjang kepangkatan Pekerja Unit Usaha Kedaton (UU Keda) dan Unit Usaha Way Berulu (UU Wabe) terdiri atas 7 strata yaitu:

- a. Strata Pembina (Manajer),
- b. Strata Penata (Sinder Kepala),
- c. Strata Pengatur (Sinder),
- d. Strata Penyelia Utama & Madya (Mabes, Krani Kepala, Tap Kontrol),
- e. Strata Penyelia Muda & Pratama (Mandor, Krani),
- f. Strata Juru (PPH, Operator, Tukang, Mekanik, Juru Tulis),
- g. Pekerja Pengolahan, Pramubakti),

h. dan Strata Pelaksana (Penyadap, Pemanen, Pembantu Krani, Satpam.

Mandor sadap berada pada jenjang kepangkatan strata penyelia muda dan pratama, secara garis organisasi mandor sadap berada di bawah sinder kepala tanaman. Struktur dan organisasi UU Keda dan UU Wabe PTPN VII (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Manajer Unit Usaha
2. Sinder Kepala Tata Usaha dan keuangan, membawahi :
 - a. Sinder Umum
 - b. Sinder Tata Usaha dan Keuangan
 - c. Kepala Krani
 - d. Krani Kepengurusan kepala satpam dan krani
3. Sinder kepala tanaman, membawahi :
 - a. Sinder Afdeling
 - b. Mandor besar
 - c. Stap control,
 - d. Mandor
4. Sinder pabrik, membawahi :
 - a. Mandor besar
 - b. Tap control dan mandor
5. Sinder Teknik, membawahi :
 - a. Mandor besar
 - b. Tap control dan Mandor

6. Kepala Lab, membawahi :

- a. Asisten Lab
- b. Analisis Lab

Struktur Organisasi unit usaha ditetapkan oleh pihak direksi PTPN VII (Persero) termasuk pimpinan dan staffnya,

e. Kebijakan Mutu perusahaan

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) melalui unit usaha yang ada berkomitmen untuk menghasilkan karet SIR 3L dan SIR 3WF yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan. Manajemen dan keseluruhan pekerja akan selalu mengembangkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen, serta mutu sesuai persyaratan ISO 9001 : 2000 serta meningkatkan secara berkelanjutan keefektifannya melalui:

- 1) Penetapan sasaran mutu pada tingkatan atau fungsi yang relevan
- 2) Pemakaian bahan baku yang bebas kontaminan
- 3) Pelaksanaan kegiatan produksi yang efektif dan efisien
- 4) SDM yang kompeten, profesional, jujur, dan berbudaya promosi
- 5) Pemantauan, analisis, peningkatan secara berkelanjutan keefektifan proses, produk dan SMM.

g. Uraian tugas

Dalam perusahaan PTPN VII UKK Way Berulu memiliki struktur jabatan yang memiliki tugas masing-masing sebagai berikut ;

1) *President Directur*

Memimpin para direksi, manager dan pelaku organisasi perusahaan lainnya sehingga perseroan dipastikan dapat berjalan sesuai RJPP dan RKAP yang telah di syahkan oleh komisaris atau pemilik perusahaan

2) *Plant Manager*

Plant manager merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap gerak majunya suatu perusahaan karena disini Plant Manager merencanakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sebuah perusahaan.

3) *Manager Produksi*

Melakukan perencanaan perusahaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menentukan standar control kualitas produk, mengawasi proses produksi, serta mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi.

4) *Manager Accounting*

Mengatur dan mengarahkan pencatatan neraca perusahaan sesuai aktivitas perusahaan dan menjaga keseimbangan neraca laba rugi serta mengontrol dan mengevaluasi pencatatan neraca laba rugi dan aktivitas akunting lainnya agar dapat berjalan secara tepat dan akurat.

5) *Manager Human Resources Development*

Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau *Preparation And Selection*. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang

mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya.

6) *Manager Marketing*

Bertanggung jawab terhadap Manager Umum, menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan strategi penjualan kepada konsumen serta membuat analisa terhadap pangsa pasar dan menentukan strategi penjualan terhadap konsumen atau pelanggan.

7) *Devisi Quality Department*

Menyusun usulan pemecahan masalah yang terkait dengan kualitas proses dan hasil produksi, menjalankan tugas-tugas Quality Control lainnya dalam upaya pencapaian target sales perusahaan, menganalisa permasalahan yang timbul pada kualitas proses dan hasil produksi, menyusun menyiapkan dokumen-dokumen QC dan data produksi, memonitor kualitas material serta hasil produksi dengan perbandingan kualitas standar dan melakukan pemeriksaan terhadap jalannya proses produksi untuk memastikan kesesuaian prosedur.

8) *Devisi Packing*

Tugas dari devisi packing hampir sama dengan pengawas yaitu mengawasi dan mengontrol kinerja anak buah di lapangan. Masing-masing proses produksi akan di awasi oleh pengawas, cuma bedanya kepala regu ini hanya ada diproses packing, karena proses packing terbagi menjadi beberapa mesin yang harus di kontrol oleh masing-

masing kepala regu.

Struktur organisasi Unit Usaha Kedaton (UU Keda) dan Unit Usaha Way Berulu (UU Wabe) berbentuk lini dan staf. Tugas untuk memberikan perintah ada pada pimpinan (manajer), sedangkan staff hanyalah sebagai pembantu pimpinan dengan tugas perencanaan, memberikan nasehat dan masukan kepada pimpinan. Selain itu, pimpinan juga mendelegasikan wewenangnya kepada staff sesuai dengan bidangnya masing-masing. Struktur organisasi PTPN VII (Persero) UU Keda dan UU Wabe dapat dilihat pada Gambar 3.

3. Pelaksanaan CSR PTPN VII UKK Way Berulu

- a. Visi “ menjadikan bagian PTPN VII UKK Way Berulu yang mampu menciptakan dan mendukung keberlanjutan perusahaan melalui harmonisasi kepentingan perusahaan, hubungan sosial masyarakat dan berwawasan lingkungan”.
- b. Misi perusahaan
 - a) Menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, teh dan tebu.
 - b) Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti mengarah ke integrasi vertikal.
 - c) Menggunakan teknologi budidaya dan proses yang efisien dan akrab dengan lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar baik untuk pasar domestik maupun internasional.

- d) Memperhatikan kepentingan *Shareholders* dan *Stakeholders*, khususnya pekerja mitra tani, pemasok, dan mitra usaha, untuk bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuh kembangkan perusahaan (PT Perkebunan Nusantara VII Persero).
- e) Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi, sosial, pendidikan masyarakat serta pelestarian lingkungan

4. Peran Utama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program PKBL dan Bina Lingkungan wilayah PTPN VII UKK Way Berulu telah disusun mengacu pada *Three Bottom Lines (planet, people, profit)* yang merupakan tiga pembangunan. *Profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. *Planet*, perusahaan peduli terhadap lingkungan dan berkelanjutan keragaman hayati.

1) Program Kemitraan

Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui kemitraan plasma. Program inti plasma ini perusahaan melaksanakan *On The Job training* atau pembinaan mulai penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha dan pemasaran hasil produksi. Adapun hasil dari program ini yaitu:

- a) Memberikan dampak positif dan memiliki *Multipliers Effect* yang sangat besar terhadap pendapatan masyarakat.
- b) Memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta menangkap peluang bisnis.
- c) Membangun sumber daya, ekonomi dan sosial menuju kesejahteraan bersama, baik kesejahteraan yang dapat diukur dengan uang maupun kesejahteraan yang tidak dapat diukur dengan uang dalam rangka sebagai untuk usaha bersama.
- d) Teratasinya sebagian kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah.
- e) Sarana partisipasi dan mengembangkan sektor swasta dalam pembangunan daerah, sebagai upaya pengembangan perekonomian daerah, berpeluang membuka peluang penyerapan tenaga kerja, sebagai media pembelajaran dan alih teknologi bagi daerah serta sebagai upaya dalam peningkatan pendapatan daerah.
- f) Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah karena telah melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Disisi masyarakat selain kepentingan masyarakat terakomodasi oleh perusahaan, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution.

2) Program Bina Lingkungan

Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMS di wilayah usaha BUMS tersebut melalui pemanfaatan hasil dari laba BUMS. Program bina lingkungan di fokuskan kepada pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan. Program bina lingkungan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar PTPN VII UKK Way Berulu desa kebagusan, pesawaran :

- a) Pendidikan, kegiatan yang dilakukan oleh pendirian sekolah masyarakat
 - 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan perusahaan yang meliputi (hukum, sosial, budaya)
 - 2) Menciptakan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sehingga mengetahui keberadaan masing-masing.
- b) Kesehatan, Kegiatan yang dilakukan berupa :
 - a. Pemberian obat-obatan kepada masyarakat serta
 - b. Bantuan unit kesehatan sekolah di wilayah tersebut
- c) Keagamaan yang di lakukan berupa :
 - 1) Pemberian santunan kepada anak yatim piatu baik melalui dana perusahaan maupun penggalangan sumbangan pribadi para pekerja
 - 2) Memberikan sumbangan dana untuk rehabilitas masjid dan musholla senilai Rp. 3.000.000

3) Memberikan dana untuk bantuan hewan qurban satu ekor sapi senilai Rp. 9.000.000

d) Pelestarian lingkungan

Kegiatan yang dilakukan berupa : pemberian bantuan pupuk untuk pertanian dan pekerbunan.

3) **Program Bina Wilayah**

Di samping pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mengacu kepada ketentuan Kementerian BUMN, Perseroan menjalankan Program Bina Wilayah sesuai amanat pasal 74 undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan komitmen perseroan untuk bersama-sama menciptakan kualitas hidup yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Pada Program Bina Wilayah, perseroan meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan fisik sarana maupun prasarana secara langsung maupun tidak langsung, selain meningkatkan perannya kegiatan kemasyarakatan. Program bina wilayah yang dilakukan PTPN 7 UKK Way Berulu peruntukan dana untuk program bina wilayah yaitu berupa bantuan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI.⁵⁹

⁵⁹<http://wbs.ptpn7.com> di akses pada tanggal 26,oktober 2018

5. Gambaran Umum Desa Kebagusan

1. Sejarah Desa kebangusan, Way Berulu

Berdasarkan monografi wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran (2012) diketahui bahwa Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran merupakan dua kabupaten yang ada di Propinsi Lampung. Luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan mencapai $\pm 2109.74 \text{ km}^2$, sedangkan Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah $\pm 2.243,51 \text{ km}^2$. Desa kebangusan kecamatan Gedong Tataan mempunyai Luas pemerintahan seluas 1.000 Ha dengan Batas wilayah sebelah Utara dengan Desa Tanjung Rejo kemudian sebelah berbatasan dengan Gunung Betung Register 19, sebelah Barat berbatasan dengan desa Sukaraja, sebelah Timur berbatasan dengan desa Wiyono. Desa kebangusan desa yang terletak di wilayah pemerintahan kecamatan Gedong Tataan, kabupaten pesawaran merupakan desa agraris yang subur. Keadaan Geografis desa yang merupakan dataran dan perbukitan banyak menyimpan potensi baik itu potensi sumber daya alam, potensi pertanian dan perkebunan maupun potensi sosial sosial budaya. Topografi Desa Kebagusan Gedong Tataan merupakan dataran, dengan ketinggian tanah 155 Mdpl dengan curah dengan curah hujan sedang 6 bulan hujan dan 6 bulan kemarau. Jarak tempuh desa kebangusan ke pusat pemerintahan kecamatan berjarak 2 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit, jarak desa ke pusat pemerintahan kabupaten berjarak 4 Km dengan waktu tempuh kurang

lebih 20 menit, dan jarak desa kebagusan ke pusat pemerintahan Provinsi berjarak 15 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam.

2. Letak Geografis Desa Kebagusan

Desa kebagusan adaah saah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pringsewu. Desa kebagusan adaah desa yang secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi terbilang maju bahkan paling maju diantara kecamatan Gedong Tataan. Luas wilayah Desa Kebagusan adalah 1.000 Ha Desa Kebagusan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :Batas wilayah sebelah Utara dengan Desa Tanjung Rejo kemudian sebelah berbatasan dengan Gunung Betung Register 19, sebelah Barat berbatasan dengan desa Sukaraja, sebelah Timur berbatasan dengan desa Wiyono. Topografi Desa Kebagusan Gedong Tataan merupakan dataran, dengan ketinggian tanah 155 Mdpl dengan curah dengan curah hujan sedang 6 bulan hujan dan 6 bulan kemarau. Jarak tempuh desa kebagusan ke pusat pemerintahan kecamatan berjarak 2 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit, jarak desa ke pusat pemerintahan kabupaten berjarak 4 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit, dan jarak desa kebagusan ke pusat pemerintahan Provinsi berjarak 15 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam.

3. Keadaan Penduduk Desa Kebagusan, Tataan

Berdasarkan data desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Kebagusan berjumlah 1832 KK atau 6702 jiwa, dengan rincian sebagai berikut

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Frekwensi	Presentase
Laki-laki	3413	50,92%
Perempuan	3289	49,07%
Jumlah	6702	100

Sumber : Monografi Desa Marang, Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa Kebagusan menurut jenis kelamin menunjukkan pertimbangan 50,92% laki-laki dan perempuan 49,07% perempuan. Antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan hanya berselisih 9,17% dari jumlah penduduk.

4. Keadaan Penduduk Menurut Usia

Komposisi Penduduk Menurut Usia 6702 Jiwa.

Usia	Frekwensi	Persentase
0-1	167	2,49%
1-4	222	3,31%
5-6	209	3,11%
7-12	797	11,89%
13-15	368	5,50%
16-20	232	3,46%
21-25	471	7,02%
26-30	794	11,84%
31-35	398	5,93%
36-40	335	5,00%
41-45	371	5,53%
46-50	371	5,53%
51-55	18	0,2
Jumlah	6702	

Dari tabel diatas terlihat komposisi terbesar penduduk desa Kebagusan diwakili penduduk yang berumur 7 sampai dengan 12 tahun (11,89%) umur 26 sampai dengan 35 tahun (11,84%).

5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

komposisi penduduk menurut mata pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
Petani	436	33,98%
Kary. Per. Swasta	248	19,32%
Kary. Per. Swasta	127	9,90%
Buruh tani	192	14,96%
Peg. Neg. Sipil	201	15,66%
Pedagang	31	2,41%
TNI	21	1,63%
POLRI	12	0,94
pensiunan	15	1,16
Jumlah	1283	100,00

Sumber : Monografi Desa Kebagusan

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian yakni sebagai petani sebanyak 436 orang (33,98%), dan 248 orang (19,32%) sebagai karyawan perusahaan swasta, sebanyak 192 orang (14,96%), bekerja sebagai buruh tani, sebanyak 201 orang (15,66%) bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan pedagang 31 orang (2,41%), kemudian TNI sebanyak 21 orang (1,63%), dan POLRI 12 orang (0,94%), dan Pensiunan 15 orang (1,16%).

6. Struktur Pemerintah Desa Kebagusan, Tataan

1. Lembaga Himpunan Desa

- a) Peratin desa Kebagusan : Tohir S.E
- b) Sekertaris : Budi Cahya Ningrat
- c) Sekertaris Desa : Budi Cahya Ningrat

2 Bagian Kaur-Kaur Desa

- a) Kaur pemerintahan : Meti Destriani
- b) Kaur umum : Dwi Sumarti Siwi
- c) Kaur kesejahteraan : Joko Suryo Triyono
- d) Kaur perencanaan : M. Idrus

3. Kepala Dusun Desa Kebagusan

- a) Kepala Dusun kebagusan I : Sobirin
- b) Kepala Dusun Kebagusan II : Jamaludin
- c) Kepala Dusun Way Layap I : Sumarjo
- d) Kepala Dusun Way Layap II : Sri Murti
- e) Kepala Dusun Sidototo : Aan Rusmayanti
- f) Kepala Dusun Way Berulu : Suprpto
- g) Kepala Dusun Kampung Sawah : Tri Yuliani
- h) Kepala Dusun Tri Harjo : Subandi

Tugas pokok dari kepala Dusun yaitu Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, pertahanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, dalam mempersiapkan bahan rumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk Hukum Desa. Adapun struktur pemerintahan desa way berulu Desa Kebagusan adalah sebagai berikut :

B. Deskripsi Masyarakat Berkaitan Dengan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PTPN VII Way Berulu Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan

Berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada responden yang ditujukan untuk masyarakat maka responden diklarifikasikan dengan empat cara, yaitu sebagai berikut :

1. Distribusi Masyarakat berdasarkan Usia

Tabel 1.1
Klarifikasi Masyarakat Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-30 Tahun	3	20%
30-40 Tahun	3	20%
>40 Tahun	9	60%
Jumlah	15	100%

Sumber : Data Hasil Kuisioner Yang Telah Diolah

Berdasarkan usia, responden usia 30-40 tahun sebanyak 3 orang atau 20% dalam penelitian ini didominasi oleh usia > 40 tahun sebanyak 9 orang atau 60%. Sedangkan yang menjadi responden 20-30 tahun yaitu sebanyak 3 orang saja.

2. Distribusi Masyarakat berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1.2
Klarifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	12	70%
Perempuan	3	30
Jumlah	15	100

Sumber : Data Hasil kuisioner yang telah di olah

3. Distribusi Masyarakat berdasarkan pekerjaan

Tabel 1.3
Klarifikasi Kemitraan Berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Ibu Rumah Tangga	3	20%
Pelajar/mahasiswa	2	13,33%
Wiraswasta	4	26,67%
Petani	6	40 %
Jumlah	15	100%

Sumber : Data Hasil Kuisioner Yang Telah Diolah.

Berdasarkan pekerjaan, responden pada penelitian ini lebih didominasi oleh petani yaitu sebanyak 6 orang 40%, sisanya terdapat wiraswasta sebanyak 4 orang atau 26,67%, ibu rumah tangga 3 orang atau 20%, dan yang menjadi responden terendah adalah pelajar/mahasiswa sebanyak 2 orang atau 13,33%

4. Distribusi bentuk penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada masyarakat.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Unit Way Berulu Tahun 2018

Nama	Nomor KTR	Pinjaman	Keterangan
Kartono	UKB/Ktr/PKBL/357/2017	20,000,000	Pengusaha Emping Jagung
Dwi Anita Sari	UKB/Ktr/PKBL/442/2017	7,000,000	Warung Sembako
Widayati	UKB/Ktr/PKBL/443/2017	5,000,000	Warung Sembako
Siti Mariyah	UKB/Ktr/PKBL/444/2017	5,000,000	Pedagang
Partinem	UKB/Ktr/PKBL/445/2017	5,000,000	Warung Sembako
Ari Susdianti	UKB/Ktr/PKBL/446/2017	15,000,000	Penjual Tupperwear
Hendra Heriyanto	UKB/Ktr/PKBL/447/2017	7,000,000	Warung Sembako
Agus Wahyu H.	UKB/Ktr/PKBL/448/2017	5,000,000	Grosir Makanan Ringan
Yopi Rahayu	UKB/Ktr/PKBL/449/2017	5,000,000	Pedagang Chicken
Retno Anggraini	UKB/Ktr/PKBL/450/2017	5,000,000	Pengusaha Kacang Pedas
Suhendrianto	UKB/Ktr/PKBL/451/2017	7,500,000	Pedagang Gas
Nuryana	UKB/Ktr/PKBL/452/2017	5,000,000	Penjual Hasil Bumi
Novi Erwanto	UKB/Ktr/PKBL/453/2017	5,000,000	Pedagang Gorengan
Mariatun	UKB/Ktr/PKBL/454/2017	4,000,000	Warung Makanan
		100,500,000	

Berdasarkan data diatas, sebagian besar masyarakat mengajukan proposal Dana untuk membuka usaha mandiri maupun perorangan. Dengan demikian dapat bahwa peaksanaan CSR mempengaruhi atau berdampak dalam meningkatkan pendapatan masyarakat walaupun sebagian besar masyarakat mengajukan Proposal dana daam bentuk skala nominal yang kecil. Pelaksanaan program kemitraan atau CSR memperhatikan kebutuhan maupun keinginan

masyarakat yang mempunyai tujuan dari program kerja yang baik dan dapat dicapai oleh perusahaan, Pelaksanaan program kemitraan mampu mengkomunikasikan tujuan dan arahan perusahaan kepada masyarakat. CSR selalu mengevaluasi dan menilai program pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa CSR yang di timbulkan kepada masyarakat telah memberikan suatu dampak yang menguntungkan serta membantu kebutuhan masyarakat sekitar.

5. Anggaran penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan rencana kerja Unit Way Berulu di beberapa daerah.

Rencana Kerja PKBL Unit Way Berulu

Tahun 2018 Alokasi Biaya Rp 300.000.000

No	Nama Desa	Jumlah Bantuan	Keterangan
1	Kebagusan	30.000.000	Jenis usaha: - Peternakan - Warung Sembako - Pertanian - Perbengkelan - Kuliner
2	Bagelen	30.000.000	
3	Wiyono	30.000.000	
4	Taman Sari	20.000.000	
5	Tanjung Rejo	20.000.000	
6	Bogorejo	30.000.000	
7	Sukaraja	20.000.000	
8	Bernung	20.000.000	
9	Kalirejo	20.000.000	
10	Karang Anyar	20.000.000	
11	Sungai Langka	20.000.000	
12	Sukabanjar	20.000.000	
13	Keagungan Ratu	20.000.000	
	Jumlah	300.000.000	

C. Kondisi Kesejahteraan Atau Pendapatan Masyarakat Desa Kebagusan Way Berulu Sebelum Dan Sesudah Adanya Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PTPN VII UKK Way Berulu

1. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya di alokasikan untuk konsumsi kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat Material. Masyarakat Desa Kebagusan yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani dan karyawan swasta dikarenakan desa Kebagusan, way berulu yang begitu luas dan kondisi geografis yang strategis untuk meningkatkan pertanian menjadi suatu alasan kenapa masyarakat desa kebangusan banyak yang menjadi petani dan karyawan swasta⁶⁰.

Adapun dengan tingkat pertumbuhan pendapatan ekonomi Desa kebangusan Way Berulu:

Tabel 1.7
Pendapatan Rata Rata Penduduk Tahun 2018

No	Jenis operasi	Pendapatan yang di peroleh
1	Petani	500.000
2	Karyawan swasta	500.000
3	Pedagang	525.000

Sumber : hasil Wawancara dengan kepala dusun Desa Kebagusan

Berdasarkan Tabel 1.7 menunjukkan sebelum adanya PTPN UUK Way Berulu pendapatan masyarakat setempat masih kurang mencukupi ini

⁶⁰ Wawancara bersama bapak Suprpto Kepala dusun WayBe 17 Desember 2018

berdampak pada penghasilan atau pendapatan masyarakat yang kurang memadai untuk dikategorikan masyarakat yang berkecukupan. Pendapatan masyarakat yang mulai meningkat setelah adanya PTPN VII UKK Way Berulu.

Tabel 1.8
Pendapatan Rata Rata Penduduk Tahun 2018

No	Jenis profesi	Pendapatan yang diperoleh
1	Petani	Rp. 1.800.000
2	Karyawan swasta	Rp. 1.600.000
3	Pedagang	Rp. 1.500.000

Sumber : Hasil wawancara Masyarakat Desa Kebagusan

Tabel diatas menunjukkan kenaikan secara signifikan terdapat pada Desa Kebagusan yang ikut daam kegiatan PTPN VII UKK Way Berulu. Sektor perkebunan memegang peranan sangat penting dalam perekonomian indonesian melalui barang dan jasa yang di hasilkan, kehadiran industri dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat dan dapat juga menambah pendapatan asli daerah. Sektor perkebunan Nusantara 7 ini bukan saja sebagai sumber mata pencaharian yang menyangkut kehidupan orang banyak, tetapi juga menyediakan sarana luas lapangan kerja. Serta memenuhi kebutuhan dasar daam suatu daerah yang mampu menciptakan nilai tambah (*value added creation*). Jenis kegiatan masyarakat yang ada di wilayah perkebunan Karet Mentah berproduksi.

2. Komposisi Pengeluaran

Pada usia menengah dan rendah pada usia tua, maka rasio tabungan akan konsumsi masyarakat mendasarkan kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya di pengaruhi oleh

masa dalam siklus hidupnya. Karena orang cenderung menerima penghasilan atau pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negative (disaving). Orang menengah menabung dan membayar kembali pinjaman ada masa muda mereka, dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang di buatnya dimasa usia menengah.⁶¹

Rumah tangga merupakan konsumsi atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual dan mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balasan jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan konsumen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.⁶² Pengeluaran dilakukan untuk kebutuhan hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan barang utama untuk kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai barang konsumsi termasuk (sandang, perumahan, bahan bakar) dan sebagainya yang terdapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan tarif konsumsi. Menurut perhitungan biro pusat statistik

⁶¹Dewa, Candra Kusuma, *Aplikasi Management Portofolio menggunakan MAD dan Algoritma titik interior*, 2008

⁶²Konsep dan Definisi Komposisi Pengeluaran masyarakat, diunduh melalui: Bps.go.id

konsumsi masyarakat meliputi seluruh pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Berikut ini merupakan tabel olah konsumsi masyarakat.

Tabel 1.8
Pola Konsumsi Masyarakat

No	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran (Rp)
1	Pengeluaran makanan	Rp. 550.000
2	Pengeluaran pendidikan	Rp. 250.000
3	Pengeluaran kesehatan	Rp. 250.000
	Total pengeluaran	Rp. 1.050.000

Sumber : hasil wawancara Dengan Masyarakat Desa Kebagusan

Tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah pengeluaran konsumsi makanan lebih besar di bandingkan dengan konsumsi pendidikan, dan kesehatan, dengan demikian dikatakan bahwa masyarakat masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sehingga warga desa Kebagusan harus mencari pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan suatu potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Desa kebagusan merupakan desa yang tingkat pendidikannya sudah menerapkan 9 tahun wajib belajar, bahkan ada juga warga yang melanjutkan kejenjang SMA dan ada juga strata satu (S1), tahun 1995 dibangunlah sekolah menengah pertama (SMP) di desa Kebagusan, Tataan hingga beroperasi mulai dari tahun 2015 SMPN Nusantara termasuk

sekolah yang dapat dijangkau dari berbagai desa karena jarak tempuhnya yang tidak terlalu jauh dari Desa Kebagusan, para peserta didik harus menempuk jarak antara 1 sd 3 /km. Begitupun jarak tempuh untuk sekolah Menengah kejuruan (SMK). Ha ini di buktikan dengan tersedianya prasarana pendidikan formal mampu merubah keadaan pendidikan suatu daerah atau wilayah. Berikut ini adalah Tabel Prasarana Pendidikan Formal Desa Kebagusan, Tataan.

Tabel 1.9
Prasarana Pendidikan Masyarakat

No	Jenis Prasarana	Ada / Tidak Ada	Baik / buruk
1	Taman kanak-kanak TK/PAUD	Ada	Baik
2	SD/ Sederajat	Ada	Baik
3	SMP/ Sederajat	Ada	Baik
4	SMA/ Sederajat	Tidak	-
5	Universitas/Sekolah Tinggi	Tidak	-

Sumber : Observasi Tanggal 17 Desember 2018

Berdirinya Desa Kebagusan mencapai usia 45 tahun, hanya tersedia prasarana pendidikan formal hingga sekolah pertama (SMP) ha ini dikarenakan beberapa faktor :

- 1) Minimnya perhatian dari pemerintah yang dikarenakan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan.
- 2) Minimnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan
- 3) Rendahnya partisipasi belajar yang diakibatkan kurangnya motivasi belajar dari pihak orang tua.

4. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktifitas secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar negara adalah himpunan development indeks (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan, (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran Riil perkapita).⁶³ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas pencacah dengan kepala desa atau lurah atau staf yang ditunjuk atau narasumber lain yang relevan. Variabel yang digunakan untuk kepentingan kajian pembangunan kesehatan ditingkat desa, diantaranya adalah (pos kesehatan, puskesmas,pondok bersalin desa dan posyandu) dan sumber daya manusia kesehatan (dokter, bidan, tenaga kesehatan lainnya), indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi :

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein yaitu 2100 kkal/hari
- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- 3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyedia obat-obatan dirumah, ongkos dokter dan perawatan. Untuk

⁶³Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,*Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia*,Hal,11

bidang kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah harapan hidup waktu lahir. Namun bila ditanya lebih lanjut, bagaimana caranya meningkatkan umur harapan hidup, sulit dijawab dengan pasti. Oleh karena tampaknya diperlukan serangkaian indikator kesehatan lain. Yang akan di perkirakan akan berdampak pada kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan umur waktu lahir.⁶⁴

Tabel 2.0
Tingkat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	2017	2018
1	Angka kematian bayi	12	0
2	Angka kematian ibu	5	0
3	Angka harapan hidup	1.374	2.003
4	Persentase persalinan oleh tenaga medis	70%	90%

Sumber :Arsip Sensus Sosial Desa Kebagusan,Kecamatan Gedong Tataan

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh seorang penduduk bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, ha ini disebabkan karena hampir seluruh Desa Kebagusan dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Desa Kebagusan yakni tiga kali sehari. Selain itu, masyarakat dalam penanganan ibu melahirkan sudah tidak menggunakan tabib atau dukun beranak , sehingga angka kematian bayi atau ibu hamil hampir tidak ada.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 13

5. Tingkat Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut WHO, rumah atau struktur fisik bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu, (komisi WHO mengenai kesehatan lingkungan).⁶⁵ Pemukiman sering disebut sebagai tempat tinggal, struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Soedarsono, staf ahli menteri Negara perumahan rakyat bidang hukum mengemukakan, jika suatu daerah telah tumbuh dan berkembang, rumah-rumah sebagai tempat bermukim manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Rumah juga dijadikan tempat berlindung dan merupakan keperluan peringkat ke dua yang mesti dicapai untuk tujuan keselamatan sebelum keperluan-keperluan diri dan keluarga yang memisahkan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perumahan merupakan sebagai suatu lingkungan tempat

⁶⁵*Ibid*

tinggal, struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani maupun rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi sosial, maupun politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ini tabel perumahan masyarakat.

Tabel 2.1
Tingkat Perumahan Masyarakat

No	Indikator perumahan	2017	2018
1	Kepemilikan rumah	-	-
2	Rumah berkuaitas baik	65%	95%
3	Rumah tangga mempunyai penerangan listrik	70%	95%
4	Rumah tangga mempunyai MCK Yang baik	80%	95%

Sumber : Monografi Desa Kebagusan Way Berulu 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan yang drastis yang terjadi pada tingkat perumahan masyarakat sebelum dan sesudah adanya Perkebunan karet Waybe tersebut. Kondisi rumah warga 95% sudah permanen, dan seluruhnya sudah mempunyai penerangan yang baik, keadaan MCK diluar rumah. Beberapa indikator pendapatan atau kesejahteraan masyarakat yang diatas, telah menunjukkan bahwa adanya perkebunan karet WayBe berdampak positif bagi masyarakat Desa Kebagusan, dimana perusahaan PTPN VII UKK Way Berulu telah memberikan manfaat karena telah terpenuhi kecukupan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pada tingkat pendapatan dan komposisi pengeluaran masyarakat telah mengalami peningkatan, sehingga tercapailah kesejahteraan walaupun keseluruhan belum maksimal.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) PTPN VII UKK Way Berulu melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

Dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74, dijelaskan bahwa perseroan menjalankan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib bertanggung jawab terhadap masalah sosial, ekonomi dan lingkungan, PTPN VII UKK Way Berulu sebagai agen *development* (agen pembangunan) dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui usaha agrobisnis, bekerja sama Program *Corporate Sosial Responsibility* yang dijalankan oleh PTPN VII WayBe memiliki peran dengan tujuan meningkatkan kinerja dan potensi ekonomi dalam membangun usaha yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan. Yang menguntungkan masyarakat dan tujuan tersebut yakni terdiri dari program CSR berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang berarti memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. Yang sering disebut *triple bottom line (profit, planet, people)* tiga prinsip itulah yang mendasari konsep CSR yang dijalankan oleh PTPN VII WayBe sehingga perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat. Program kemitraan tersebut

merupakan upaya dalam meningkatkan pemberdayaan serta pendapatan masyarakat serangkaian kegiatan agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dari program kemitraan ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Adapun pendapatan masyarakat perbulan sebelum dan setelah adanya PTPN VII UKK Way Berulu melalui kemitraan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Peran Kemitraan PTPN VII UKK Way Berulu

No	Nama binaan program kemitraan	Sebelum Adanya program kemitraan PTPN VII UKK Waybe	Setelah Adanya program kemitraan PTPN VII UKK Waybe
1	Kartono	Rp. 500.000	Rp. 1.150.000
2	Dwi Anita Sari	Rp. 585.000	Rp. 1.250.000
3	Widayati	Rp. 650.000	Rp. 1.250.000
4	Siti Mariyah	Rp. 640.000	Rp. 1.325.000
5	Partinem	Rp. 536.000	Rp. 1.450.000
6	Ari Susdianti	Rp. 575.000	Rp. 1.620.000
7	Hendra Heriyanto	Rp. 580.000	Rp. 1.670.000
8	Agus Wahyu H.	Rp. 650.000	Rp. 1.730.000
9	Yopi Rahayu	Rp. 535.000	Rp. 1.750.000
10	Retno Anggraini	Rp. 513.000	Rp. 1.860.000
11	Suhendrianto	Rp. 530.000	Rp. 1.830.000
12	Nuryana	Rp. 690.000	Rp. 1.930.000
13	Novi Erwanto	Rp. 675.000	Rp. 1.970.000
14	Mariatun	Rp. 790.000	Rp. 2.050.000

Sumber : informasi Pendapatan Asli Daerah, Desa Kebagusan 2018.⁶⁶

⁶⁶Budi, Informasi Pendapatan Asli Daerah, Desa Kebagusan, Kabupaten Pesawaran Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dibuktikan bahwa pendapatan upah Desa kebagusan telah mencapai kenaikan 100% dibandingkan tahun 2010-2018 pendapatan masyarakat masih dalam tingkat kekurangan karena pendapatan upah sangat terbatas akan tetapi setelah tahun 2012 ke atas semakin bertambah di akibatkan teah di bangun PTPN VII UKK Way Berulu yang memberikan peran tanggung jawab sosial di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Penentuan kadar dan jumlah upah yang diberikan kepada karyawan telah sesuai dengan prinsip prinsip syariah karena upah yang diberikan kepada karyawan mencapai batas kecukupan, yakni cukup kebutuhan diri dan keluarga. Hal ini dilihat tingkat perkembangan perekonomian setempat UMR Kabupaten Pesawaran sebesar Rp 1.319.000. Sedangkan pendapatan upah karyawan PTPN VII WayBe lebih dari jumlah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pendapatan upah yang diterima masyarakat telah melebihi UMR didaerah ini. Pembayaran upah dilakukan secara utuh tanpa adanya unsur penundaan yang disengaja. Pengaruh peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut. Kontribusi CSR adalah berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkeanjutan, yaitu bekerja sama dengan karyawan, masyarakat maupun keluarga mereka untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang diterima oleh bisnis dan juga pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar CSR. Karena apabila tanggung jawab sosial perusahaan tidak baik maka peningkatan pendapatan masyarakat tidak ada peningkatan, dan peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendapatan masyarakat.

Peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dijalankan oleh PTPN VII UKK Way Berulu pada tahun 2018 meliputi kemitraan melakukan (*on the job training*) program lingkungan dan bina wilayah. Peran tanggung jawab sosial berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang berarti memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan masa depan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan yang sering disebut *Tripe Bottom Line* (*profit, planet, people*) tiga prinsip inilah yang mendasari konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh PTPN VII UKK Way Berulu sehingga perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Apabila perusahaan memiliki tanggung jawab sosial (CSR) yang baik maka akan dapat mengalami peningkatan pendapatan perkapita yang berimbas dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam program bina lingkungan PTPN VII UKK Way Berulu menyalurkan dana bantuan pendidikan, kesehatan, pelestarian dan sarana dan prasarana. Program tersebut bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pengadaan fasilitas kesehatan, pendidikan, pelestarian serta sarana prasarana yang lebih layak, sehat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelestarian alam dan lingkungan. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yang intinya memiliki dua fungsi unsur yaitu kebutuhan yang wajib dipenuhi terutama bagi miskin dan kedua adanya

keterbatasan sumber daya dan teknologi serta kemampuan organisasi sosial dalam memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan masa kini dan masa mendatang.

Selain itu juga program bina wilayah PTPN VII UKK Way Berulu menyalurkan bantuan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI program tersebut bertujuan untuk memberdayakan sekaligus mewujudkan komitmen perseroan untuk bersama-sama menciptakan kualitas yang lebih baik lagi serta meningkatkan perannya dalam kegiatan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan dorongan berbagai hal salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan pengalaman negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa pembangunan selain mendorong kemajuan juga menyebabkan kemunduran, karena dapat mengakibatkan kondisi lingkungan rusak sehingga tidak dapat lagi mendukung pembangunan. Pelaksanaan pembangunan akan berhasil baik apabila didukung oleh lingkungan (sumber daya alam) yang secara memadai.

Adapun hasil dari peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh PTPN VII UKK Way Berulu dari tahun ketahun sebagai bentuk bantuan yang meliputi kemitraan, lingkungan (PKBL) dan bina lingkungan yang merupakan program tambahan, program tersebut dilakukan perusahaan dengan memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung.

Berikut ini adalah bentuk program kemitraan dan bina lingkungan bantuan dari perusahaan yang diberikan untuk masyarakat.

program	2014	2015	2017	2018
keagamaan	1.200.000	1.550.000	1.750.000	3.000.000
pendidikan	-	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Kesehatan	-	Pemeriksaan kesehatan gratis	Obat-obatan untuk masyarakat	Bantuan UKS sekolah
Pelestarian lingkungan	-	Pemberian bibit pohon	-	Pemberian pupuk
kemitraan	Pelatihan kerja	magang	Bimbingan manajemen	Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Bina Wilayah	—	HUT RI	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000

Sumber : wawancara Direktur dan Buku Besar laporan PTPN VII UKK WayBe

B. Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Corporate Sosial Responsibility merupakan kegiatan bagian dari prinsip-prinsip dalam etika bisnis islam merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana ia berada.maksudnya sebuah perusahaan hendaknya ikut berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi,lingkungan perusahaan yaitu berupa program kemitraan yang dibangun oleh perusahaan dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program kemitraan yang dibangun oleh perusahaan dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Etika bisnis islam adalah normatif disiplin, dimana ada standar-standar yang sudah di tentukan dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut dengan landasan Al-Qur'an dan Hadists. Terdapat lima prinsip etika bisnis yaitu :

1. Prinsip tauhid merupakan dimensi partikal islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial, ekonomi, dan kehidupan manusia menjadi kebutuhan yang homogen konsisten dari dalam dan luar bahwa sekaligus alam luas.
2. Prinsip keadilan atau keseimbangan berarti bahwa pelaku bisnis yang harus adil dan seimbang. Ajaran islam berprorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain (masyarakat dengan lingkungan)
3. Prinsip kejujuran adalah suatu nilai yang harus dimiliki oleh para pembisnis, karena Al-Qur'an menekankan adanya kebenaran suatu potensi yang dilandasi kebenaran dan kejujuran.
4. Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak mementingkan kepentingan kolektif, kepentingan individu di buka lebar tidak adanya batasan pendapatan bagi orang manusia untuk aktif berkarya segala potensi yang dimilikinya.
5. Prinsip tanggung jawab berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnisnya. Harta sebagai komoditi bisnis islam adalah amanah tuhan yang harus di pertanggung jawabkan di depan tuhan. *Corporate Sosial Responsibility* merupakan bagian dari prinsip-prinsip dalam etika bisnis islam. Yang merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana ia berada. Maksudnya sebuah perusahaan hendaknya ikut berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi sosial

ekonomi serta lingkungan perusahaan. Adapun nilai-nilai positif yang ada pada peran *Corporate Sosial Responsibility* sebagai berikut :

1) Program kemitraan

Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri. Hal ini juga mencerminkan sifat yang mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajiban suatu perusahaan. Selain itu juga telah menimbulkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat.

2) Pembinaan Mitra (*On The Job Training*)

Hal ini terkait dengan strategi perubahan sikap dan perilaku bisnis yang etis dan profesional. Kemitraan tersebut sesuai dengan tujuan dari peran CSR itu sendiri yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha serta terbentuknya masyarakat mandiri. Dengan demikian secara tidak langsung PTPN VII Way Berulu telah melepaskan satu kesulitan dalam hal kepemilikan modal untuk membuka usaha atau berwiraswasta.

3) Program Bina Lingkungan

Membantu masyarakat mendapatkan pelayanan sosial dan umum yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya berupa santunan anak yatim memberikan sumbangan hewan Qurban, rehabilitas masjid, memberikan obat-obatan masyarakat serta menjamin kesejateraan mereka yang membutuhkan pertolongan. Kontribusi suatu perusahaan

yang diberikan kepada masyarakat tersebut tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang khususnya bidang peningkatan kemampuan ekonomi yang mengakibatkan terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemajuan ekonomi masyarakat sangat berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup mereka, dengan demikian usaha untuk membentuk masyarakat yang makmur dan sejahtera yang kemudian pokok syariat islam yang terdiri atas lima komponen (pemeliharaan agama, akal, jiwa, dan keturunan) akan tercapai. Islam sangat mendorong terwujudnya hubungan kerja sama atau kemitraan. Upaya-upaya yang memiliki tujuan menguntungkan individu ataupun masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dibidang ekonomi. Pemningkatan pendapatan ekonomi ini bisa diaplikasikan dengan memproduksi, mengolah dan pemberdayaan sumber daya alam yang ada. Dalam ekonomi islam ada Tujuh aspek aturan atau sistem yang harus dijadikan pedoman oleh para pelaku ekonomi yaitu:

- a) Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia
- b) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- c) Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama
- d) Ekonom islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja

- e) Ekonomi islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak
- f) Seseorang muslim harus takut kepada Allah Swt dan hari penentuan di akhirat
- g) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab) serta Islam melarang riba dalam segala bentuk.⁶⁷

Dalam kontrak ini, maka CSR islam adalah yang merujuk pada praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama islam yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dan menjaga kontrak sosial didalam praktik bisnisnya. Dengan demikian, praktik bisnis kerangka CSR islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta *profitnya*, namun cara-cara memperolehnya dan pendayagunaannya hartanya, dibatasi oleh aturan halal dan haramnya sesuai syari'ah. CSR Islam bertujuan menciptakan kebajikan yang di lakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat Ribawi, melainkan yang berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

⁶⁷Edi Suharto, CSR dan CONDEV *Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung Hlm. 98-99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan dan pembahasan tentang Analisis dampak program kemitraan PTPN VII dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pada PTPN VII UKK Way Berulu, Desa Kebagusan Tataan, Pesawaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program kemitraan pada PTPN VII UKK Way Berulu telah dijalankan sejak awal perusahaan berproduksi berupa CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), bina lingkungan yang meliputi (pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, keagamaan dan bantuan sosial) serta bina wilayah (bantuan kegiatan HUT kemerdekaan Ri). Dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan yang mencakup Tiga kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan yang sering disebut *Triple Bottom Lines (planet, people, profit)*. Yang merupakan tiga pilar pembangunan berkelanjutan selain pembangunan berkelanjutan, program kemitraan juga telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara signifikan bisa dirasakan oleh masyarakat pengaruh dari program kemitraan yang diberikan oleh perusahaan PTPN VII UKK Way Berulu.
2. Prinsip tanggung jawab berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnisnya. Harta sebagai komoditi bisnis islam adalah amanah tuhan yang harus di pertanggung jawabkan didapan tuhan. *Corporate Sosial Responsibility* merupakan bagian dari prinsip-prinsip dalam etika bisnis islam. Yang

merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana ia berada.

3. Prinsip keadilan atau keseimbangan berarti bahwa pelaku bisnis yang harus adil dan seimbang. Ajaran islam berprinsip pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain (masyarakat dengan lingkungan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab ini dapat diarahkan mulai dari dirinya sendiri, kepada karyawan, perusahaan lain, lingkungan sosial bahkan sampai negara. Oleh karena itu diperlukan prosedur yang tepat dan profesional sebagai pedoman dalam menjalankannya.
2. Program kemitraan Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri. Hal ini juga mencerminkan sifat yang mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajiban suatu perusahaan. Selain itu juga telah menimbulkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat.
3. Sebaiknya PTPN VII UKK Way Berulu meningkatkan implementasi *Corporate Sosial Responsibility* lebih maksimal lagi karena hal ini

berpengaruh secara tidak langsung terhadap citra perusahaan, dalam jangka panjang bukan tidak mungkin dapat meningkatkan *profitabilitas* secara signifikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2005
- Sugiono, *Penelitian Administratif*, Bandung: Alfabeta, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2008
- Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* PT Gramedia Pusataka, Jakarta, 2011
- Dwi Kartini, *Corporate Sosial Responsibility*, transformasi konsep sustainability managemen dan implentasi di indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Edi Suharto, CSR dan COMDEV, *Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung, Oktober 2010.
- Gini Ratio, *Usi pendapatan masyarakat Kabupaten Banyu Asin*, Jurnal Ekonomi, 2007, Hlm 1, <https://www.distribusi> Pendapatan Masyarakat, id. Akses b24 Oktober, 2013
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Sosial Responsibility*, Sinar Grafik: Yogyakarta, 2008
- <https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Tanggung> jawab_sosial perusahaan. Di akses pada tanggal 19 September 2018
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Adi Maulana Dan Novitha Indra Sallama, *Ekonomi Pembangunan*, PT. Gelora Akasara Pratama, Jakarta, 2011
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016
- M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Penerjemah: Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar, SE), Cet1, 1999.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, Malang Press, 2007

Muhammad, M.ag, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2007.

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Kencana Renada Media Grup, Jakarta, 2007.

Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Rahman, Panduan lengkap *Corporate Social Responsibility*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011

Soeratno dan lincon Arsyad, *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Rev. Ed., UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2008

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Perssada, Jakarta, 1998

<https://wbs.ptpn.7.com>

Syeh Nawab' Hadar Naqwi, *Menggagas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Yusuf Wibisono, *Ekonomi Masyarakat*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2008.

Haeruman, Herman, *Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Lembaga Kemitraan Pemerintah Swasta, Dan Masyarakat*. Jakarta, 2001

Sedarmayanti, *Good Governance Pemerintah Yang Baik*, Bandung, Mandar Maju, 2004.

Sulistiani, Ambar Teguh, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gava Media, 2004

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi Dan Tesis*, Jakarta Erlangga, 2008.

Susanto, A.B., *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategi Manajemen Dalam CSR*. Jakarta, Esensi Grup, 2009

Carrol, Archie. B. The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts. Research and Practice. *International Journal of Management Review* 2010.

- Susanto, A.B. 2007. *A Strategic Management Approach (Corporate Sosial Responsibility)*, Jakarta, 2010.
- Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility)*. Fascho Publishing, Gresik.2007.
- Zaleha, Siti, *Peranan Corporate Sosial Responsibility PT. Inalum Divisi PLTA Sigura-Gura Terhadap Sosio-Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir*. Tesis S2 PWD Sps USU, Medan, 2008



